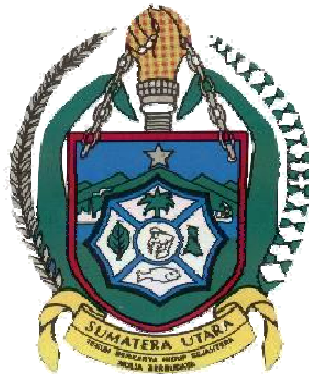


**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2013 - 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 7 No. 255 Telepon (061) 8461456-8474976
Medan**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT yang maha sempurna. Tiada ilmu dan kekuatan kecuali mutlak milikNya sehingga atas berkah dan rahmat serta curahan ilmu dariNya, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 dan ketentuan-ketentuan yang terkait. Fungsi Rencana Strategis ini pada dasarnya adalah untuk memberikan haluan dan arahan dengan merinci langkah-langkah dan kegiatan yang akan ditempuh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai misinya. Namun Rencana Strategis ini bukanlah alat yang baku, sehingga terbuka untuk disesuaikan apabila terjadi hal-hal penting yang bersifat internal maupun eksternal.

Sebagai haluan dan acuan rencana strategis ini memuat pokok-pokok pikiran yang bersumber dari sejumlah isu strategis yang membantu menetapkan program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan disusun menurut skala prioritas serta mendukung kepada visi dan misi yang akan dicapai.

Demikian Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, semoga bermanfaat.

Medan,

Kepala Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Utara,



Drh. Parmohonan Lubis
Pembina Tk. I
NIP. 19590914 198709 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-10
1.3 Maksud dan Tujuan	I-11
1.4 Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	II-1
2.2 Sumber Daya SKPD	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-12
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 Visi dan Misi SKPD	IV-1
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV-2
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	IV-5
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan PNS pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara	II-17
Tabel 2.2.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	III-12
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara	III-1
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-11
Tabel 3.3.	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	III-15
Tabel 3.4.	Proyeksi Perkembangan Konsumsi dan Produksi Daging Sapi/Kerbau, Serta Populasi Sapi/Kerbau tahun 2013-2018 di Sumatera Utara	III-21
Tabel 5.1.	Asupan Protein Anjuran	V-1
Tabel 5.2.	target Konsumsi Daging Menurut Komoditas	V-2
Tabel 5.3.	Target Konsumsi dan Produksi Daging dari 2013-2018	V-2
Tabel 5.4.	Target Produksi Daging (ton) Menurut Komoditas pada tahun 2013-2018	V-3
Tabel 5.5.	Target Perkembangan Populasi ternak (ekor) 2013-2018.....	V-3
Tabel 5.6.	Biaya yang Diperlukan (Rp M) Menurut Bidang	V-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau Hasil PSPK 2011	III-21
Gambar 3.2. Kasus Gigitan Anjing	III-24
Gambar 3.3. Serangan Cholera (prevalensi) pada Ternak Babi	III-25
Gambar 3.4. Kasus Flu Burung (AI) di Sumut pada Tahun 2010	III-26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara
- Lampiran 4. kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman Pengembangan Sapi Potong
- Lampiran 5. Strategi, kebijakan Operasional dan Kegiatan Pengembangan Sapi Potong yang diperlukan
- Lampiran 6. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pengembangan Sapi Perah
- Lampiran 7. Strategi, Kebijakan Operasional, dan Kegiatan Pengembangan Sapi Perah yang Diperlukan
- Lampiran 8. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Pengembangan Unggas Lokal
- Lampiran 9. Strategi, Kebijakan operasional, dan Kegiatan pengembangan Unggas Lokal yang diperlukan
- Lampiran 10. Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman Pengembangan Kembang/Domba
- Lampiran 11. Strategi, Kebijakan Operasional dan Kegiatan Pengembangan Kambing/Domba
- Lampiran 12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan SKPD
- Lampiran 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (renstra) berisi program dan target indikator kinerja yg harus dicapai SKPD selama lima tahun baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra SKPD meliputi persiapan :

1. Penyusunan rancangan renstra SKPD
2. Penyusunan rancangan akhir
3. Penetapan renstra SKPD

Tahapan rancangan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan renstra SKPD Provinsi. Kegiatan persiapan ini meliputi :

- A. Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD
 1. Orientasi mengenai Renstra SKPD
 2. Penyusunan agenda kerja
 3. Pengumpulann data dan informasi
- B. Penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi 2 tahap yaitu
 1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD
 2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD

Perumusan rancangan Renstra SKPD dilakukan secara simultan denga proses penyusunan RPJMD dan terdiri dari

1. Pengolahan data dan informasi (gambaran pelayanan SKPD, data dan informasi pengelolaan dan pendanaan)
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD yang meliputi analisis gambaran umum pelayanan dan analisis pengelolaan pendanaan
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga, Review mencakup :
 - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L,

-
- b. Program prioritas KL dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Kota; dan
 - d. Program prioritas SKPD Kabupaten Kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
4. Penelaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran RTRW
 - b. Struktur dan pola ruang dan
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
 5. Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD
 6. Perumusan isu - isu strategis berdasarkan
 - a. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD,
 - b. Hasil review Renstra KL dan Renstra Kabupaten Kota;
 - c. Hasil penelaahan RTRW;
 - d. Hasil analisis dokumen KLHS; dan
 - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD.
 7. Perumusan Visi dan Misi SKPD
 8. Perumusan Tujuan pelayanan SKPD
 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

Kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat edaran Kepala Daerah perihal penyusunan rancangan renstra SKPD adalah :

1. Mempelajari Surat Kepala Daerah perihal Penyusunan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu Rancangan Awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per SKPD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;

-
3. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
 4. perumusan indikator kinerja RPJMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
 5. Pelaksanaan forum SKPD

tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume pertemuan, bahan paparan, hasil research dan lain lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak pihak terkait di tiap tahap perumusanm penyusunan rancangan Renstra SKPD.

Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Renstra SKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD mencakup

- a. Regulasi yang menjadi azas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;
- b. RENJA SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan RNJA SKPD tahun lalu;
- d. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD lima tahun terakhir;
- e. Standart Pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib dan atau indicator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya;
- f. Renstra KL;
- g. Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten Kota
- h. RTRW
- i. Peraturan Perundang Undangan terkait pelayanan SKPD dan
- j. Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD.

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD untuk menunjukkan :

- a. Peran SKPD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya;
- c. Capaian Kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode Sebelumnya;
- d. Capaian Kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD dengan periode sebelumnya;
- e. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi

- a. Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
- b. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan
- c. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Analisis renstra KL dan SKPD Kabupaten Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra KL dan Renstra SKPD Kabupaten Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra KL dan Renstra SKPD Kabupaten Kota; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra KL atau rata-rata Kabupaten Kota

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola tata ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola tata ruang eksisting maka SKPD secara

geografis dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas pelayanan SKPD dalam 5 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, Rencana, dan atau Program. KLHS memuat kajian meliputi :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup,
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem,
- d. Efisiensi pemberdayaan sumberdaya alam
- e. Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS tersebut menjadi dasar bagi kebijakan yang rencana, dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi itu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam rumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah :

- a. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD;
- b. Hasil analisis Renstra KL, Renstra SKPD Provinsi dan Renstra SKPD Kabupaten Kota;
- c. Hasil Telaahan RTRW;

d. Hasil analisis KLHS.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai mencakup berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi didasarkan pada realita dengan fokus pada masa depan sehingga memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi (waktu lima tahun yang akan datang) oleh karena itu kriteria rumusan Visi SKPD meliputi :

- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam lima tahun mendatang;
- b. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan sebagai acuan bagi perumusan tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
- c. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD dan
- d. Sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik external maupun internal dalam bentuk kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mempengaruhi pembangunan daerah. Kriteria rumusan misi meliputi :

- a. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD;

-
- b. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis external dan internal daerah dan
 - c. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah difahami

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan berdasarkan penjabaran visi dan misi SKPD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mereview pernyataan visi dan misi SKPD,
 - b. Mereview pernyataan Tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD,
 - c. Mereview hasil rumusan isu-isu strategis SKPD, dan
 - d. Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara mendiskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai
- Sasaran pelayanan jangka menengah SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Langkah dalam perumusan sasaran meliputi :
- a. Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan;
 - b. Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari rancangan awal RPJMD yang menjadi tanggungjawab SKPD;
 - c. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan,
 - d. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD,

-
- e. memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Perumusan sasaran perlu memenuhi kriteria smart-c yaitu Spesifik yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas, Measureable yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur, Achievable yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada, Relevant yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan, Timebound yakni periode pencapaian sasaran waktunya ditetapkan, Continuously Improve yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra juga dicermati surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan renstra SKPD yang dilampiri rancangan awal RPJMD dengan indikator keluaran program dan pagu per SKPD dari surat edaran kepala daerah tersebut dicermati :

- a. Jadwal penyampaian rancangan SKPD,
- b. Muatan rancangan awal RPJMD, dan
- c. Indikator keluaran program dan pagu indikatif per SKPD.

Rumusan strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perumusan strategi pada renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
- b. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk setiap langkah yang dipilih,
- c. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tetap antara lain dengan menggunakan metode SWOT

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Langkah-langkah perumusan kebijakan meliputi :

- a. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
- b. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran,
- c. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas tersebut berdasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian sasaran RPJMD, perumusan indikator kinerja SKPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Riview terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD,
- b. Identifiikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung dalam capaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan

-
- c. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD

Rancangan renstra SKPD dibahas dalam volume SKPD untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan renstra SKPD. Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan SKPD dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan untuk 5 tahun mendatang

1.2. Landasan Hukum

Tahapan dan tata cara penyusunan serta isi Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Utara 2013-2018 didasarkan dan mempedomani peraturan dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- Undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan di daerah
- Undang - undang No. 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tara cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Undang - undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tara cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2001 tentang Dinas-dinas daerah Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 70 Tahun 2011 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

-
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2012 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
 - Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara 2009-2013.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini dan kedepan dihadapkan kepada beratnya tantangan yang akan dihadapi yaitu dinamika lingkungan global maupun domestik serta lingkungan ekonomi yang semakin kompetitif. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan bersaing yaitu kemampuan menghasilkan mutu produk peternakan secara efisien dan efektif sesuai dengan selera konsumen dalam upaya merebut pangsa pasar dalam negeri dan jika memungkinkan juga pasar internasional.

Disadari bahwa mutu produk akhir peternakan merupakan resultansi dari kompetensi sumber daya manusia dalam mengaplikasikan teknologi bibit, pakan, budidaya, dan pengolahan, maka dibutuhkan pengembangan teknologi tersebut secara simultan dan konsisten.

Maksud penyusunan Renstra adlah untuk mengakomodir pengembangan teknologi yang demikian hanya dapat melalui pembangunan system agribisnis secara totalitas yang dimulai dari perencanaan sebagai alat marginal awal. Oleh karena itu rencana strategis ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan dan upaya terobosan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara ke arah yang lebih baik.
- b) Sebagai haluan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara tahun 2013-2018.
- c) Sebagai dokumen yang akan menjadi sarana dan pengikat komunikasi, koordinasi, konsekuensi dan komitmen berbagai pihak terkait meliputi kalangan internal, eksternal secara horizontal dan vertikal dalam upaya

percepatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara.

- d) Sebagai dasar, alat dan sarana serta indikator dalam mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- e) Sebagai pedoman umum dalam memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders terkait khususnya kepada masyarakat peternak.

1.4. Sistematika Penulisan

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD. Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana

saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Hasil interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian sebelumnya pada analisis gambaran pelayanan SKPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD maka dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Naskah rancangan Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Perda Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Dinas Daerah dalam kedudukannya pada organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tugas dan fungsi dari Dinas ini dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2012 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 70 Tahun 2011 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur di atas, maka tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi, dibidang sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan pembinaan usaha peternakan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana, prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana, prasarana peternakan, bidaya ternak, kesehatan hewan dan pembinaan usaha peternakan;
- c. Penyelenggaraan pemberian perizinan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang peternakan dan kesehatan

hewan.

- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan.
- c. Menyelenggarakan pengkoordinasi pengawasan sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan.
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum sarana dan prasarana peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan bina usaha peternakan.
- e. Menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Menyelenggarakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
- i. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui sekretaris daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh :

-
- 1) Sekretariat;
 - 2) Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - 3) Bidang Budidaya Ternak;
 - 4) Bidang Kesehatan Hewan ;
 - 5) Bidang Bina Usaha Peternakan;
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dibidang urusan Umum, Keuangan dan Program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat.
- b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum.
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat.
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat.
- e. Penyelenggaraan Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- f. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
- j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas Sekretaris mempunyai uraian tugas:

-
- a. Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana teknis Dinas;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas,
 - c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD Dinas;
 - i. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomonikasian dan persandian,
 - k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal
 - l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor.
 - m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
 - n. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor
 - o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional.
 - p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas,
 - q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;

-
- s. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas.
 - t. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris dibantu :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perbibitan Ternak, Pakan Ternak serta alat dan mesin peternakan dan kehewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang sarana dan prasarana peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan ternak, pakan ternak serta alat dan mesin peternakan dan kehewan wilayah Provinsi.
- b. Penyelenggaraan Penyusunan, pembinaan dan pengawasan pedoman perbibitan (standard mutu) pakan ternak serta alat dan mesin peternakan dan kehewan wilayah provinsi.
- c. Penyelenggaraan Pengawasan peredaran lalu lintas bibit / benih ternak, pakan ternak berikut bahan bakunya serta alat dan mesin peternakan dan kehewan wilayah provinsi.
- d. Penyelenggaraan Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit Day Old Chick (DOC) wilayah provinsi.
- e. Penyelenggaraan Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Provinsi.
- f. Penyelenggaraan Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah Provisni.
- g. Penyelenggaraan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi untuk memberdayakan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan perbibitan, pakan ternak serta alat dan mesin peternakan dan kehewan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

-
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. Penyelenggaraan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. Pemberian masukan yang diperlukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pengawasan mutu bibit unggas yang diproduksi dan diedarkan antar kabupaten dan antar provinsi agar sesuai SNI (Standart Nasioanal Indonesia).
- b. Menyelenggarakan pengawasan mutu bibit ternak ruminansia kecil, ruminansia besar dan non ruminansia sesuai SNI (Standart Nasioanal Indonesia).
- c. Menyelenggarakan pemuliaan bibit ternak untuk memperoleh bibit ternak murni.
- d. Menyelenggarakan persilangan ternak untuk menghasilkan bibit ternak unggul.
- e. Menyelenggarakan pengawasan lalu lintas (keluar masuk) bibit ternak antar kabupaten atau antar provinsi.
- f. Menyelenggarakan pusat pembibitan pedesaan (VBC), yang dikelola oleh kelompok peternak, SMD (Sarjana Membangun Desa).
- g. Menyelenggarakan pengembangan pusat pembibitan ternak ruminansia besar melalui bantuan modal lembaga keuangan.
- h. Menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan plasma nuftah ternak.
- i. Menyelenggarakan progeny test, sertifikasi bibit.
- j. Menyelenggarakan proses rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit.
- k. Menyelenggarakan seleksi bibit ternak baik lokal maupun import.
- l. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perbibitan
- m. Menyelenggarakan pemetaan wilayah sumber bibit.

-
- n. Menyelenggarakan bibit untuk program strategis dan prioritas
 - o. Menyelenggarakan pendampingan kegiatan perbibitan nasional.
 - p. Menyelenggarakan monitoring kegiatan perbibitan.
 - q. Menyelenggarakan pemeriksaan mutu pakan ternak baik unggas, ruminansia dan non ruminansia sesuai SNI (Standart Nasional Indonesia)
 - r. Menyelenggarakan pengawasan peredaran, lalu lintas pakan antar provinsi dan antar kabupaten.
 - s. Menyelenggarakan pengembangan pakan lokal.
 - t. Menyelenggarakan percontohan pemanfaatan bahan hasil samping pertanian untuk pakan ternak.
 - u. Menyelenggarakan pengembangan padang penggembalaan, hijauan makanan ternak (HMT) melalui bibit hijauan unggul.
 - v. Menyelenggarakan kerja sama pemeriksaan mutu pakan dengan instansi berwenang.
 - w. Menyelenggarakan proses rekomendasi pemasukan pakan, bahan pakan ke luar masuk wilayah Sumatera Utara.
 - x. Menyelenggarakan pembangunan lumbung pakan ternak di Pedesaan yang dikelola kelompok.
 - y. Menyelenggarakan pembangunan pabrik pakan mini (skala kecil) di tingkat peternak.
 - z. Menyelenggarakan pemetaan sumber pakan lokal spesifik Sumatera Utara.
 - aa. Menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai pakan ternak bagi masyarakat
 - bb. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan pakan ternak.
 - cc. Menyelenggarakan pengembangan pakan untuk program strategis dan prioritas nasional.
 - dd. Menyelenggarakan pendampingan kegiatan pakan nasional.
 - ee. Menyelenggarakan monitoring kegiatan pakan ternak.
 - ff. Menyelenggarakan pengembangan alat dan mesin peternakan.
 - gg. Menyelenggarakan pembangunan biogas ternak di tingkat peternak.
 - hh. Menyelenggarakan pembangunan mesin tetas unggas di tingkat peternak.

-
- ii. Menyelenggarakan pengembangan mesin pengolah hasil samping pertanian atau perkebunan untuk pakan ternak.
 - jj. Menyelenggarakan pemanfaatan energi biogas untuk penerangan, memasak dan lainnya.
 - kk. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembuatan , pemanfaatan dan operasional Alat dan mesin peternakan.
 - ll. Menyelenggarakan pembangunan sarana air bagi kepentingan peternakan.
 - mm. Menyelenggarakan pengadaan alat dan mesin untuk keperluan peternakan.
 - nn. Menyelenggarakan pengawasan alat dan mesin peternakan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia).
 - oo. Menyelenggarakan pendistribusian alat dan mesin peternakan pada kelompok.
 - pp. Menyelenggarakan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan.
 - qq. Menyelenggarakan pemetaan produksi dan distribusi alat dan mesin peternakan.
 - rr. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lain dalam pengkajian dan pengembangan alat dan mesin peternakan.
 - ss. Menyelenggarakan pengadaan alat dan mesin peternakan untuk program strategis Dan Nasional.
 - tt. Menyelenggarakan pendampingan kegiatan alat dan mesin peternakan nasional.
 - uu. Menyelenggarakan monitoring alat dan mesin peternakan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan dibantu :

- a. Seksi Perbibitan Ternak
- b. Seksi Pakan Ternak
- c. Seksi Alat dan Mesin Peternakan

Bidang Budi Daya Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Pelayanan Kemitraan dan Pelayanan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Budi Daya Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar dibidang penyebaran dan pengembangan ternak, pedoman kerjasama kemitraan serta pelayanan usaha peternakan wilayah provinsi.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama untuk memberdayakan swasta dan masyarakat dalam melakukan budidaya ternak, kerjasaman kemitraan dan pelayanan usaha peternakan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian program pembangunan jangka tahunan dan menengah dibidang penyebaran dan pengembangan ternak, kerjasaman kemitraan dan pelayanan usaha peternakan.
- d. Penyelenggaraan penyusunan dan penetapan kawasan peternakan wilayah provinsi.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Uapaya Penataan Lingkungan (UPL) di bidang peternakan wilayah provinsi.
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Amdal wilayah provisnsi.
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Penyelenggaraan pelaporan dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai aturan yang ditetapkan.
- i. Pemberikan masukan yang perlu dan positif kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Budi Daya Ternak uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan, analisis, pengolahan dan penyajian bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan standard pedoman pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak, kebijakan dibidang kemitraan dan

-
- kerjasama operasional serta kebijakan bidang pelayanan usaha peternakan wilayah provinsi.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi dan koordinasi dalam penyebaran dan pengembangan ternak wilayah provinsi.
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi serta identifikasi dalam penetapan kawasan peternakan wilayah provinsi.
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak wilayah provinsi.
 - e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan bidang penyebaran dan pengembangan ternak sesuai standard dan aturan yang ditetapkan.
 - f. Menyelenggarakan pengawasan terhadap redistribusi ternak wilayah provinsi.
 - g. Menyelenggarakan sosialisasi evaluasi dan pembinaan kemitraan kerjasama operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kemitraan, kerjasama operasional peternakan wilayah provinsi.
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mengembangkan kemitraan, kerjasama operasional peternakan wilayah provinsi.
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan integrasi peternakan dengan sub sektor lain.
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan swasta dan masyarakat dibidang usaha peternakan dan analisis usaha peternakan.
 - l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan pelayanan usaha peternakan wilayah provinsi.
 - m. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan yang berhubungan dengan AMDAL, UKL, UPL dibidang peternakan wilayah provinsi.
 - n. Menyelenggarakan bimbingan dan penerapan pedoman norma standard sarana usaha peternakan wilayah provinsi.
 - o. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak potong dari dan kewilayah provinsi.

-
- p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Ternak sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - q. Pemberi masukan yang perlu dan positif kepada Kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - r. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala dinas sesuai aturan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Budi Daya Ternak dibantu :

- a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- b. Seksi Pelayanan Kemitraan;
- c. Seksi Pelayanan Usaha.

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investigasi Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, serta Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota, dan standard pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka tahunan dan menengah dibidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta pengawasan dan peredaran obat hewan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pengendalian program pembangunan jangka tahunan dan menengah dibidang kesehatan hewan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.
- c. Penyelenggaraan sosialisasi, monitoring , evaluasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan menyangkut kesehatan hewan Wilayah Propinsi.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi, monitoring , evaluasi pembinaan, pemantauan dan pemberantasan serta pengawasan menyangkut penyakit hewan menular (PHM) Wilayah Propinsi.

-
- e. Penyelenggaraan koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan hewan Wilayah Propinsi.
 - f. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi kesehatan hewan terhadap lalu lintas ternak/ hewan.
 - g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - h. Pemberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan wilayah propinsi.
- b. Menyelenggarakan pengawasan peredaran lalu lintas ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah propinsi dan lintas kabupaten/kota.
- c. Menyelenggarakan pengamatan, penyidikan, pengamatan dini, pemetaan epidemiologi) penyakit hewan wilayah propinsi.
- d. Menyelenggarakan penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan wilayah propinsi.
- e. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan wialayah propinsi.
- f. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular (PHM) wilayah propinsi.
- g. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular (PHM) wilayah propinsi.
- h. Menyelenggarakan pencegahan penyakit hewan menular wilayah propinsi.
- i. Menyelenggarakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat propinsi.
- j. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan ke/dari wilayah Indonesia antar propinsi di wilayah propinsi.

-
- k. Menyelenggarakan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis rumah sakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, unit pelayanan kesehatan hewan terpadu, pusat kesehatan hewan dan distributor obat hewan..
 - l. Menyelenggarakan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).
 - m. Menyelenggarakan penerapan kebijakan obat hewan wilayah propinsi.
 - n. Menyelenggarakan pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah propinsi.
 - o. Menyelenggarakan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah propinsi.
 - p. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaporan pelayanan medik di propinsi.

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu :

- a. Seksi Investigasi Penyakit Hewan.
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- c. Seksi Pengawasan Obat Hewan.

Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi permodalan, pengolahan pasca panen hasil peternakan, promosi dan pemasaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka tahunan ,menengah dan panjang yang berkaitan dengan fasilitasi permodalan, pengolahan pasca panen hasil peternakan serta promosi dan pemasaran.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian program pembangunan jangka tahunan, menengah dan panjang yang berkaitan dengan fasilitasi permodalan, pengolahan pasca panen hasil peternakan serta promosi dan pemasaran.

-
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam fasilitasi permodalan/investasi untuk memberdayakan swasta dan masyarakat dalam melakukan usaha peternakan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam pengolahan pasca panen hasil peternakan untuk membina pengusaha pengolahan hasil peternakan sehingga menghasilkan produk olahan yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam promosi dan pemasaran sehingga tercipta informasi yang baik dan benar tentang produk hasil usaha bidang peternakan baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - g. Pemberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar dalam pembinaan fasilitasi permodalan dalam pengembangan usaha peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- b. Menyelenggarakan pembinaan investasi usaha peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan permodalan usaha peternakan bekerja sama dengan lembaga keuangan/perbankan, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah Terkait dan Swasta sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

-
- d. Menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat maupun kelompok usaha peternakan tentang fasilitasi permodalan usaha peternakan maupun pengolahannya wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi permodalan kepada kelompok peternak bekerja sama dengan lembaga penyaluran kredit seperti Bank Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Swasta lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - f. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi penyaluran kredit usaha peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - g. Menyelenggarakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar dalam pembinaan pengolahan pasca panen hasil peternakan wilayah provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - h. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pengembangan pengolahan pasca panen hasil peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan.
 - i. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan pengolahan pasca panen hasil peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jaminan mutu produk peternakan, olahan dan hasil ikutannya wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - k. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan , pengolahan dan petugas lapangan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - l. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

-
- m. Menyelenggarakan bimbingan perhitungan , perkiraan kehilangan hasil usaha peternakan wilayah provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - n. Menyelenggarakan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan
 - o. Menyelenggarakan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - p. Menyelenggarakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk peternakan , hasil olahan dan ikutannya wilayah provinsi sesuai dengan kketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - q. Menyelenggarakan pembinaan promosi dan pemasaran hasil produk peternakan, olahan dan ikutannya wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - r. Menyelenggarakan sosialisasi tentang produk-produk peternakan, hasil olahan dan ikutannya wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - s. Menyelenggarakan pemantauan dan monitoring pemasaran serta perkembangan informasi harga pasar produk peternakan , hasil olahan dan ikutannya wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - t. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak lain dalam penyebarluasan informasi pasar dan pengembangan pemasaran hasil produk peternakan, olahan dan ikutannya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - u. Menyelenggarakan promosi dan ekspos/pameran produk paternakan, hasil olahan dan ikutannya di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- v. Menyelenggarakan pengawasan penerapan sistem informasi pasar wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Bina Usaha dibantu :

- a. Seksi Fasilitasi Permodalan
- b. Seksi Pengolahan Pasca Panen Hasil Peternakan
- c. Seksi Promosi & Pemasaran

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia. Jumlah seluruh pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 161 Orang. Dari jumlah tersebut terdapat pegawai negeri sipil sebanyak 130 orang dengan berbagai keahlian yang mendukung terlaksananya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan baik (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Keadaan PNS pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

No.	Pendidikan	Sekr.	SP	Budidaya	Keswan	Binus	IB	Kesmavet	Jumlah
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	SLTP	2	1				1	1	5
3.	SLTA	13	3	5	7	3	6	4	41
4.	Sarjana Muda	-	-	1	-	-	-	2	3
5.	S-1	19	7	5	7	3	9	4	54
6.	S-2/Drh.	5	1	-	1	1	1	-	9
	JUMLAH	39	12	11	15	7	17	11	112

Keterangan : Sekr. = Sekretariat; SP = Sarana Prasarana; BD = Budidaya; Keswan = Kesehatan Hewan; Binus = Bidang Usaha Peternakan; IB = Inseminasi Buatan; Kesmavet = Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sumberdaya Asset atau Modal. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara memiliki asset yang mencakup tanah, bangunan, ternak, kendaraan, dan alat perkantoran.

Sumber Daya Alam. Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 71.680,68 Km² dengan jumlah penduduk 13.248.386 jiwa yang terdiri dari 3.027.500 rumah tangga, berada pada ketinggian 0-1800m dpl (dari permukaan laut) dan terletak pada 1^o-4^o Lintang Utara 98^o – 100^o Bujur Timur, serta memiliki dataran rendah sampai pantai, dataran tinggi sepanjang deretan bukit barisan, cocok dan potensial untuk pengembangan sistem agribisnis peternakan bagi semua jenis dan bangsa ternak.

Sumber Daya Pembiayaan. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Utara di dukung pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota. Di samping itu juga didukung pembiayaan yang berasal dari pihak swasta, lembaga keuangan melalui penyaluran kredit serta pembiayaan swadaya masyarakat.

Dukungan kelembagaan. Wilayah dan kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara meliputi 25 kabupaten, 8 kota dan terdiri dari 387 kecamatan meliputi 5.420 desa dan kelurahan. Untuk mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan wilayah kerja yang cukup luas tersebut, fasilitas dan infrastruktur dari tahun ketahun semakin baik. Disamping itu kelembagaan pendukung baik kelembagaan pemerintah, swasta maupun kelembagaan peternak terus mengalami perkembangan. Kelembagaan yang dimaksud antara lain adalah;

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Inseminasi Buatan dan UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang masing-masing bertanggung jawab terhadap pelayanan IB dan peningkatan jaminan keamanan pangan asal hewan. Kedua UPT ini dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
- Balai Penyidikan Penyakit Veteriner (BPPV) regional I Medan, yang melaksanakan penyidikan penyakit hewan. BPPV ini merupakan UPT Pusat

-
- di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
- Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sinur Siborong-borong yang menghasilkan bibit ternak kerbau dan babi unggul. BPTU ini juga merupakan UPT Pusat di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
 - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, yang melakukan pengkajian untuk mendapatkan teknologi peternakan spesifik lokasi Sumatera Utara yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis peternakan. BPTP merupakan UPT Pusat di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
 - Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyuluhan. Badan ini di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
 - Loka Penelitian Ternak Kambing Potong (Lokalitkapo) Sei Putih, yang menghasilkan teknologi budidaya kambing potong. Lokalitkapo merupakan UPT Pusat di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
 - Dinas/ Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh kabupaten atau kota, yang melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di daerah masing-masing.
 - Pos pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium penyakit hewan tipe C sebanyak 12 unit tersebar di kabupaten/ kota, yang aktif melayani pencegahan penyakit hewan serta melaksanakan pengamatan dini.
 - Rumah Potong Hewan sebanyak 31 unit, terdiri dari 1 Unit tipe B, 23 Unit tipe C dan 7 Unit tipe D di Kabupaten/ Kota, merupakan sarana untuk menyediakan daging yang ASUH, mendiagnosa penyakit serta meminimalisir pemotongan ternak betina produktif.

-
- Pos pelayanan Inseminasi Buatan yang tersebar di kab/ kota dengan 182 orang inseminator, 21 orang PKB (pemeriksaan kebuntingan), 13 orang ATR (Asisten Teknis Reproduksi) dan 14 orang Supervisor, secara terus-menerus meningkatkan pelayanan inseminasi buatan terhadap ternak sapi, kambing, kerbau, dan domba.
 - Perusahaan pembibitan ayam ras dan pakan sebanyak 8 perusahaan, yang memproduksi DOC dan pakan untuk melayani kebutuhan di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat.
 - Perusahaan obat hewan yang terdiri dari 2 perusahaan produksi, 3 importir, 19 distributor dan 40 depo, yang melayani kebutuhan obat dan vaksin serta peralatannya.
 - Kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang bergerak pada pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang tersebar di kabupaten/ kota.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat digambarkan melalui tiga indikator utama yaitu, populasi, produksi, dan konsumsi hasil ternak.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat digambarkan melalui tiga indikator utama yaitu, populasi, produksi, dan konsumsi hasil ternak.

a. Perkembangan Populasi. Capaian perkembangan populasi bervariasi, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang mengalami penurunan. Jenis ternak yang mengalami penurunan populasi adalah sapi perah, kerbau, ayam buras, dan ayam ras pedaging. Sementara itu, komoditas sapi potong, kuda, kambing, domba, babi, ayam ras petelur, dan itik mengalami peningkatan populasi. Rasio

realisasi terhadap target yang tertinggi (1,4) dicapai oleh ternak sapi potong dan terendah oleh ternak kuda (0,86).

b. Rekomendasi pengembangan populasi. Masalah utama pada penurunan populasi adalah kurang baiknya mutu bibit ternak, pemberian pakan yang seadanya, dan minimalnya pengendalian hama dan penyakit. Oleh karena itu, penurunan populasi dapat dihindari melalui upaya-upaya strategis berupa peningkatan keberhasilan IB, penyediaan pejantan unggul, pengembangan VBC (Village Breeding Centre) yang melakukan proses seleksi dan culling secara ketat. Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan dalam filosofi ransum serasi dan seimbang yang didukung oleh pemanfaatan bahan pakan lokal. Untuk menekan tingkat mortalitas maka perlu diupayakan langkah strategis berupa vaksinasi yang tepat, sanitasi yang reguler, serta pengobatan yang tepat waktu.

c. Perkembangan produksi. Peningkatan produksi daging terjadi selama lima tahun berturut-turut, namun demikian tingkat capaian masih dibawah target produksi (0,89 – 0,96). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas ternak sumber daging yang dipelihara. Untuk produksi telur, juga terlihat peningkatan selama 5 tahun terakhir, tetapi pencapaian target baru diperoleh pada tahun 2012 dan 2013, masing-masing dengan rasio 1,05 dan 1,04. Produksi susu mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan rasio 0,87 (2009) dan menurun menjadi 0,26 pada tahun 2013.

d. Rekomendasi peningkatan produksi. Untuk semua jenis ternak yang dikembangkan perlu dilakukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui penerapan sapta usaha peternakan dengan pendekatan agribisnis. Sapta usaha peternakan meliputi : 1. Bibit unggul; 2. Pakan; 3. Perkandangan; 4. Kesehatan; 5. Perkembangbiakan; 6. Manajemen; dan 7. Pemasaran.

e. Perkembangan konsumsi. Sejalan dengan perkembangan produksi selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat konsumsi daging, dan telur juga mengalami peningkatan. Sedangkan konsumsi susu mengalami penurunan secara drastis dari 0,13 liter/kap/tahun (2009) menjadi 0,06 liter/kap/tahun pada tahun 2013.

Rekomendasi peningkatan konsumsi. Berdasarkan kecukupan gizi maka jumlah asupan protein per hari sebaiknya berada pada tingkat 55 gram/kapita (WKNPG, 2004). Dengan asumsi bahwa kontribusi protein hewani terhadap total asupan protein adalah 35%, maka berdasarkan pola konsumsi yang ada diharapkan 14% berasal dari ikan, 10% berasal dari daging dan 10% berasal dari telur, serta 1% dari susu. Dengan asumsi target asupan protein di atas, maka dapat dihitung jumlah kebutuhan terhadap daging sebesar 9,84 kg/kap/th, telur 15,13 kg/kap/th, dan terhadap susu sejumlah 2,81 kg/kap/th. Produksi susu yang dilaporkan pada tahun 2010 adalah 1.850 ton, jauh di bawah angka kebutuhan dan oleh karenanya terlihat di Sumatera Utara tingkat swasembada susu masih jauh dari mencukupi. Selain sapi perah, ternak penghasil susu lainnya adalah kambing perah dan kerbau perah. Sangat disayangkan bahwa eksistensi kedua jenis komoditas ternak tersebut belum terdata dengan baik. Mengingat begitu rendahnya kecukupan susu ini, sangat diharapkan pengembangan populasi maupun produktivitas ketiga komoditas ternak perah di atas terus ditingkatkan.

Perencanaan anggaran pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode 2009-2013 masih kurang rasional, apalagi dikaitkan dengan realisasinya (Lampiran 2). Hal ini tergambar pada beberapa hal antara lain a) target PAD dari hasil retribusi tahun 2009 dan 2010 sangat melonjak, namun realisasinya menurun, b) target dan realisasi PAD 2011-2013 tidak ditargetkan, c) target belanja daerah dari tahun 2009-2012 dan realisasinya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013, targetnya menurun dari Rp. 8.256.648.000,- (2012) menjadi Rp. 4.207.963.259,- (2013), namun realisasinya sampai dengan September 2013 telah mencapai Rp. 5.349.203.481,-. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum dilakukan secara teliti. Oleh karena itu, kedepan diharapkan agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih baik serta mengacu kepada kebutuhan percepatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara.

Kegiatan inseminasi buatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dilaksanakan di 19 kabupaten/kota. Target distribusi semen beku ternak sapi pada

tahun 2012 adalah 75.000 dosis dan untuk semen beku kambing/domba belum ada target karena masih dalam tahap introduksi, sedangkan inseminator ternak kambing/domba serta peralatannya masih sangat terbatas, dan untuk semen beku ternak kerbau Provinsi Sumatera Utara masih tahap sosialisasi kepada peternak.

Dari 75.000 dosis yang ditargetkan untuk distribusi semen beku, telah terealisasi sebesar 77.933 dosis meningkat dibandingkan distribusi tahun 2011 yaitu 70.843 dosis. Realisasi pelaksanaan inseminasi buatan (IB) baik pada sapi potong maupun sapi perah adalah sebesar 68.451 dosis meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 65.212 dosis. Jumlah akseptor IB pada tahun 2012 baik pada sapi potong dan sapi perah sebanyak 56.758 meningkat dari tahun 2011 yaitu 54.019 ekor. Dan kelahiran hasil inseminasi buatan pada tahun 2012 adalah 37.388 ekor merupakan sebagian dari hasil pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan pada tahun 2011 dan sebagian dari tahun 2012 sendiri. Jumlah kelahiran yang diperoleh berasal dari laporan petugas dari kabupaten/kota yang mengirimkan laporannya. Sampai dengan akhir Desember 2012. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hasil inseminasi buatan pada tahun 2011 yaitu 35.015 ekor.

Realisasi distribusi semen beku ternak kambing/domba sebesar 657 dosis yaitu kambing 257 dosis dan domba 400 dosis. Realisasi pelaksanaan inseminasi buatan (IB) pada kambing adalah 88 dosis dan domba 155 dosis. Jumlah akseptor kambing 88 ekor dan domba 155 ekor dengan kelahiran kambing 10 ekor dan domba 81 ekor.

Pada tahun 2012 semen beku kerbau yang telah didistribusikan adalah 312 dosis. Realisasi pelaksanaan inseminasi buatan (IB) pada kerbau 33 dosis dengan jumlah akseptor sebanyak 32 ekor dan kelahiran 15 ekor. Untuk lebih jelas rincian target, distribusi semen beku, realisasi pelaksanaan inseminasi buatan dan kelahiran T.A 2012 dapat dilihat pada lampiran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Telaahan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2013-2033. Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya. Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang

darat maupun ruang laut untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu.
2. Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan. Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan peternakan kecil/unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kepulauan Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan.

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan kecil meliputi seluruh kabupaten kota.

Telaahan KLHS Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah belum ada kawasan peternakan yang terpadu dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga bio gas. Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong terhadap

kecenderungan masa depan adalah sulit mengembangkan energi listrik tenaga biomassa akibat kawasan peternakan yang tidak direncanakan secara terpadu dengan pembangkit listrik.

Dampak negatif peningkatan produksi hasil peternakan diikuti dengan pertumbuhan jumlah ternak yang berimplikasi pada kotoran ternak sehingga berdampak negatif terhadap pencemaran air tanah dan pencemaran Udara serta berpotensi terhadap alih fungsi lahan khususnya yang berfungsi lindung akan terjadi terutama pada peternakan rakyat yang melepaskan ternaknya untuk memenuhi pakannya sendiri.

Mitigasi. Pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas serta pengelolaan limbah cair peternakan dengan teknologi lingkungan tepat guna terutama pada kelompok-kelompok peternakan rakyat, serta pengembangan industri pakan ternak yang terjangkau peternakan rakyat.

Rekomendasi. dalam peta Pola ruang RTRW Kab/kota pemanfaatan ruang bagi lokasi peternakan secara eksplisit sebaiknya sudah diplotkan sebagai deliniasi kawasan budidaya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap tugas dan fungsi SKPD, dapat dilihat bahwa Bidang Kesekretariatan, Bidang pengembangan sarana dan prasarana (khususnya pakan), dan budidaya ternak memiliki capaian sangat baik (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kesekretariatan	87,04 % (sangat baik)	Evaluasi 2011	SDM, Sarana, Prasarana, Dana	Koordinasi	Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kurang memadai
2. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan					
a. Perbibitan	49,47 % (cukup)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Sumber Daya, Koordinasi	Kompetensi SDM belum memadai
b. Pakan	92,59 % (sangat baik)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Sumber Daya Pakan	Penyimpanan terbatas
3. Budidaya ternak	85,27% (sangat baik)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Koordinasi, Teknologi	Penerapan teknologi masih rendah, wilayah kerja luas
4. Kesehatan hewan	47,89% (cukup)	Evaluasi 2011	SDM, Sarana, Prasarana, Dana	Koordinasi	Rendahnya partisipasi masyarakat.
5. Usaha peternakan	60,0 % (cukup)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Koordinasi	Skala usaha kecil
6. Kesmavet	77,02 % (baik)	Evaluasi 2011	SDM, Sarana, Prasarana, Dana	Perda, kesadaran masyarakat	Komitmen Pemda belum optimal, kesadaran masyarakat masih rendah.
7. Inseminasi Buatan	65,0% (baik)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Sumberdaya	Kualitas semen beku belum optimal

Walaupun demikian, masih dijumpai permasalahan utama dalam hal belum memadainya jumlah dan kualitas sarana serta prasarana, dan masih kurangnya penerapan teknologi tepat guna. Kondisi menjadi semakin sulit dengan luasnya wilayah kerja.

Untuk bidang Kesmavet dan Inseminasi Buatan, capaiannya baik, namun juga masih menghadapi persoalan di bidang komitmen Pemda yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta kualitas semen beku yang belum optimal.

Bidang kesehatan hewan, usaha peternakan, dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan khususnya perbibitan, capaiannya masih dalam kategori cukup. Hal ini diduga berkaitan dengan permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, skala usaha yang masih kecil, dan kompetensi SDM yang belum memadai untuk mengelola perbibitan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara tersebut dianggap sebagai tantangan pengembangan. Ragam tantangan yang ada dalam 5 tahun terakhir ini mencakup sebagai berikut :

- Minimnya petugas teknis lapangan (Penyuluh, Inseminator, Petugas kecamatan, petugas kesmavet, petugas kesehatan hewan dan petugas teknis lainnya), serta sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk menopang pelaksanaan sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan nasional.
- Terbatasnya modal pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pada sisi lain fasilitas kredit dari lembaga keuangan sulit diperoleh.
- Sistem pemasaran ternak belum efisien dan belum berkeadilan sehingga belum mampu mendorong semangat untuk berwirausaha peternakan.
- Belum tersedianya bibit ternak ruminansia yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas.

-
- Di beberapa kabupaten dan kota, iklim berusaha belum kondusif.
 - Masih adanya ancaman penyakit baik yang sifatnya endemis dan merugikan (SE, Hog cholera, PRRS) maupun penyakit zoonosis (flu burung, flu babi, anthrax, brucellosis, rabies, salmonellosis, leptospirosis).
 - Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif.
 - Belum terjaminnya pangan hewan yang ASUH, karena adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, seperti adanya daging illegal, pencampuran daging, penambahan bahan pengawet dan lain-lain.
 - Rapuhnya koordinasi, baik secara vertikal, horizontal dan koordinasi antara struktural dan fungsional baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa.

Potensi pendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara sangat besar dan beragam, namun sampai dengan saat ini potensi tersebut baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan. Walaupun disadari bahwa potensi dimaksud bukanlah potensi riil peternakan, tetapi adalah potensi sektor dan sub sektor terkait yang dapat diintegrasikan dengan peternakan dalam prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Beberapa potensi dimaksud adalah sebagai berikut;

- Padang rumput berupa alang-alang masih terdapat \pm 1.311.159 Ha. yang tersebar diberbagai kabupaten/ kota di Sumatera Utara.
- Perkebunan yang menghasilkan limbah, baik limbah segar maupun limbah olahan merupakan sumber pakan potensial. Dari luas perkebunan kelapa sawit, kakao dan tebu di Sumatera Utara masing-masing 1.119.400 Ha, 70.797 Ha dan 17.767 Ha menurut perhitungan Departemen Peternakan Universitas Sumatera Utara memiliki daya dukung untuk \pm 1.200.000 ST ternak ruminansia.
- Limbah tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, tanaman sayuran dan buah-buahan) memiliki daya dukung 1.037.750 ST ternak ruminansia.

-
- Peluang dan pangsa pasar ternak dan hasil-hasilnya cukup besar, baik pasar domestik, regional maupun ekspor. Peluang ekspor yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi oleh Sumatera Utara adalah ternak kambing dan domba ke Timur Tengah dan Malaysia, ternak babi ke Singapura serta produk olahan ayam ke Jepang.
 - Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi di Sumatera Utara cukup tersedia seperti Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, BPTP, BPPV, Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih, dan BPTU Siborong-borong.
 - Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan pendekatan sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan maupun undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor terutama para pelaku utama peternakan dan kesehatan hewan di daerah ini sebagian besar adalah peternak rakyat / peternak kecil yang sarat dengan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Di samping itu seperti telah diuraikan terdahulu, bahwa potensi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang sangat besar dan beragam di Sumatera Utara, masih sebagian kecil saja yang sudah dapat dimanfaatkan, sedang sebagian besar lagi masih menunggu uluran tangan para pelaku-pelaku yang kreatif dan dinamis.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah "*Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara yang Sejahtera*". Makna atas pernyataan visi tersebut adalah a) Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan; b)

Menjadi, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik; c) Provinsi, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota; d) Berdaya saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di atas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik. d) Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan per kapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Visi tersebut di atas dicapai melalui 5 misi yang meliputi 1) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious, dan berkompentensi tinggi; 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan internasional; 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan, dan keadilan serta mengurangi ketimpangan daerah; 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance dan clean government.

Misi 1 adalah menciptakan sumberdaya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (pengamalan IMTAQ dan penguasaan IPTEK). Misi ini bermakna bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan internal dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu melalui misi ini diharapkan tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta terbangunnya karakter yang berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Misi 2 adalah membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta, kerjasama regional, dan kerjasama internasional. Misi ini bermakna bahwa

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada di masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta, kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan kawasan ekonomi khusus.

Misi 3 adalah meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pernyataan misi ini bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standar hidup layak, setara, dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan Pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenaga listrik, telematika, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Misi 4 adalah membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Misi ini bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan system ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, serta penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan.

Misi 5 adalah pembinaan pemerintahan yang professional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan system pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Misi ini bermakna bahwa

untuk menunjang pembinaan aparatur Negara yang professional dan berkompentensi, serta mendorong penegakan hukum yang konsisten, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Prioritas pembangunan yang pertama dalam Misi-1 berupa peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter SDM yang diwarnai oleh IPTEK dan IMTAQ yang berdaya saing. Kebijakan umum dalam pencapaian hal ini ada tujuh meliputi 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk pencapaian wajar pendidikan 12 tahun; 2) Peningkatan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan; 3) Pemenuhan kualifikasi pendidikan guru S2/S1/D-IV; 4) Sertifikasi Guru; 5) Peningkatan insentif Guru; 6) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda; 7) Meningkatkan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat local, nasional, dan regional. SKPD pelaksana untuk implementasi kebijakan umum ini adalah Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Lembaga pendukung meliputi Dewan Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, dan KONI Sumut.

Prioritas pembangunan yang kedua dalam Misi-1 berupa peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dalam mendukung daya saing SDM. Kebijakan umum dalam pencapaian hal tersebut adalah 1) Pembangunan sarana/prasarana kesehatan untuk pencapaian indeks kesehatan yang baik; dan 2) Peningkatan cakupan layanan kesehatan (universal coverage) melalui Jamkesda, dan Jampersal. SKPD pelaksana dari kebijakan umum ini adalah Dinas Kesehatan, RSJ daerah, Rumah Sakit Haji, dengan didukung oleh Orkemas Kesehatan, RS Swasta, dan JBHC.

Prioritas pembangunan yang ke-3 dalam Misi-1 berupa peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreativitas daerah diarahkan untuk menggunakan hasil riset untuk optimalisasi pemanfaatan SDA dan daya saing SDM. Kebijakan umum dalam pencapaian hal tersebut ada dua yaitu 1)

Pengembangan riset Teknologi Tepat Guna (TTG); dan 2) Research and development (R&D) mendukung pengembangan kawasan strategis, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus melalui kerjasama R&D dengan Perguruan Tinggi dalam/luar negeri dan lembaga riset lainnya melalui pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD). SKPD pelaksana dari kebijakan umum ini adalah Badan Litbang Daerah (Balitbangda) dengan didukung oleh PTN/PTS, Lembaga Riset, dan DRD.

Prioritas pembangunan ke-4 ada didalam Misi-2 yaitu peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana, dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian, diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur yang berdaya saing dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada delapan mencakup 1) Peningkatan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk mencapai kondisi yang mantap; 2) Peningkatan aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan untuk efisiensi dan stabilisasi harga; 3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan air baku; 4) Peningkatan rasio elektrifikasi; 5) Kapasitas daya listrik terpasang; 6) Rumah tangga pengguna air bersih; 7) Rehabilitasi rumah layak huni; dan 8) Mitigasi bencana. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut adalah Bina Marga, PSDA, Dishub, Distarukim, Badan Lingkungan Hidup, Distamben, dan BPBD. SKPD tersebut didukung oleh kerjasamanya dengan pihak swasta terkait (Public and Private Partnership).

Prioritas pembangunan ke-5 juga ada dalam Misi-2 yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada enam mencakup 1) Peningkatan produktivitas koperasi dan UKM dengan target pertumbuhan 10-15%/tahun; 2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UKM dengan target pertumbuhan 10%/tahun; 3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk koperasi untuk tujuan ekspor pada 30 koperasi dan UKM; 4) Terbinanya UMKM dalam sentra industry kecil yang mencakup 300 UMKM; 5)

Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM Pariwisata pada 3 destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias, dan Berastagi) dan terlatihnya 100 orang petugas parawisata; dan 6) Peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 10%. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut meliputi Diskop dan UKM, Disperindag, dan Disbudpar, yang didukung oleh Perusahaan BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan, dan Perusahaan swasta lainnya.

Prioritas pembangunan ke-6 ada dalam Misi-3 yaitu perluasan kesempatan kerja dan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada 3 meliputi 1) Penurunan angka pengangguran terbuka; 2) Penurunan persentase penduduk miskin; 3) Penciptaan kesempatan kerja baru melalui optimalisasi rumah produktivitas daerah bagi sarjana yang belum berkerja yaitu sekitar 1.000 sarjana, dan mendorong terciptanya sekitar 60.000 pengusaha pemula. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut mencakup Disnakertrans, Dinkessos, Bapemmas, Pendes, yang didukung oleh Perusahaan yang memiliki fasilitas pelatihan dan magang, serta mendapatkan pembiayaan skim kredit mikro bunga rendah dengan system perguliran.

Prioritas pembangunan ke-7 ada dalam Misi-4 yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian, kelautan, dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, kelautan, dan perikanan. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada 5 yaitu 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan pada beras, jagung, kedele, dan daging sapi; 2) Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan untuk pencapaian Pola Pangan Harapan; 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditi perkebunan, hortikultura; 4) Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dalam bentuk peningkatan nilai tukar petani (NTP); 5) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut adalah BKP, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, dan Bakorluh P2K. Dukungan diharapkan dari perusahaan agribisnis dan agroindustri.

Prioritas pembangunan ke-8 ada dalam Misi-5 yaitu peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada 13 meliputi 1) Peningkatan kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama melalui pemberdayaan lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, dan perbaikan rumah ibadah sekitar 1.000 unit; 2) Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; 3) Peningkatan iklim perpolitikan yang kondusif; 4) Peningkatan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 5) Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum; 6) Terwujudnya iklim berusaha yang baik dalam mendukung daya saing daerah; 7) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan; 8) Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 10) Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan; 11) Terwujudnya system informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi; 12) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah; 13) Peningkatan kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri, dan dengan swasta. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut meliputi KDH/Wakil KDH, DPRD, Sekretariat Daerah (+11 Biro), Bappeda, BPPT, BPMP, Bakesbangpol, Satpol PP, Diskominfo, KPID, Sekr. KORPRI, Sekr. DPRD SU, Kantor Penghubung, BKD, Badiklat, Inspektorat, Dispenda, dan didukung oleh seluruh stakeholders yang berkepentingan dan memiliki kepedulian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Prioritas pembangunan ke-9 juga ada dalam Misi-5 yaitu mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK) untuk menjamin adanya sinergitas pembangunan daerah dengan sasaran/tujuan pembangunan nasional. Kebijakan umum untuk mencapai tujuan

tersebut ada 8 meliputi 1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan MP3KI dengan tujuan mencapai keberhasilan yang relative cepat (quick wins) di lokasi yang ditentukan; 2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran MP3EI yang difokuskan pada terfasilitasinya KEK Sei Mangke Kabupaten Simalungun dan sekitarnya; 3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-MDGs yang mencakup 7 sasaran yaitu a) kemiskinan dan kelaparan, b) pendidikan dasar, c) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, d) angka kematian anak, e) kesehatan ibu, f) penanganan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, g) kelestarian lingkungan; 4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-PG yang mencakup 3 sasaran yaitu a) angka kebutuhan energy minimal 2.200 kkal/kap/hari, b) prevalensi gizi buruk pada balita, c) prevalensi ukuran tubuh pendek pada balita; 5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RAD-GRK; 6) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RAD-PK; 7) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RAD-PUG; dan 8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut adalah seluruh SKPD yang terkait dan dilaksanakan secara lintas SKPD.

Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Misi-ke 5 yaitu Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
1	Program peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang belum optimal. • SDM belum memadai. 	Desentralisasi	Potensi SDA tinggi

2	Program peningkatan kesejahteraan petani.	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah kerja cukup luas • SDM belum memadai. 	Keterbatasan sarana dan prasarana	Elastisitas Permintaan produk ternak tinggi
3	Program pengembangan agribisnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha peternakan kecil • SDM belum memadai. 	Terbatasnya permodalan	Tersedianya skim kredit bunga ringan
4	Program peningkatan produksi hasil peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produktivitas ternak. • SDM belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas bibit. • Terbatasnya pakan. • Ancaman PHMS. 	Tersedianya teknologi pendukung
5	Program peningkatan pemanfaatan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat penerapan teknologi • SDM belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan. 	Tersedianya teknologi teruji.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab./Kota

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Sumatera Utara terhadap Renstra SKPD Kabupaten/Kota tidak dapat ditampilkan karena tidak tersedianya capaian sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota (Tabel 2.2).

Komparasi terhadap capaian sasaran Renstra K/L pada tahun 2013 menunjukkan bahwa untuk populasi ternak telah tercapai bahkan dilampaui, kecuali ternak itik (69,8%) dan ayam buras (98,3%). Sama halnya dengan populasi ternak, maka produksi daging dari berbagai komoditas juga telah mencapai sasaran, kecuali daging ayam buras (68%), itik (71,3%), kambing (94,7%), dan domba (97,5%). Untuk produksi telur, sasaran K/L telah dilampaui (129,2%), dan untuk produksi susu masih sangat jauh dibawah sasaran Renstra K/L (44,9%).

Tabel 2.2. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi		Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L tahun 2013
		2012	2013*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Populasi (ekor)				
	Sapi potong	609,951	625,817	-	625,807
	Sapi perah	1,057	1,075	-	993
	Kerbau	131,483	139,701	-	116,659
	Kambing	781,774	805,065	-	645,112
	Domba	374,286	409,375	-	299,499
	Babi	866,207	947,414	-	754,828

	Ayam buras	12,073,428	12,447,014	-	12,660,173
	Itik	2,790,326	2,848,329	-	4,078,671
2	Produksi daging (ton)	135,911	151,415	-	114,494
	Sapi	24,547	32,171	-	32,091
	Kerbau	7,308	9,652	-	9,652
	Kambing	3,353	3,452	-	3,646
	Domba	1,707	1,867	-	1,914
	Babi	38,221	41,088	-	490
	Ayam buras	14,314	14,757	-	21,689
	Itik	2,409	2,459	-	3,451
3	Produksi telur (ton)	133,464	137,687	-	106,568
4	Produksi susu (ton)	761	774	-	1,724

* Angka perkiraan

Komparasi terhadap capaian sasaran Renstra K/L pada tahun 2013 menunjukkan bahwa untuk populasi ternak telah tercapai bahkan dilampaui, kecuali ternak itik (69,8%) dan ayam buras (98,3%). Sama halnya dengan populasi ternak, maka produksi daging dari berbagai komoditas juga telah mencapai sasaran, kecuali daging ayam buras (68%), itik (71,3%), kambing (94,7%), dan domba (97,5%). Untuk produksi telur, sasaran K/L telah dilampaui (129,2%), dan untuk produksi susu masih sangat jauh dibawah sasaran Renstra K/L (44,9%).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya. Arahana pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu.

-
2. Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan. Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan peternakan kecil/unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kepulauan Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan.

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan kecil meliputi seluruh kabupaten kota.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah belum ada kawasan peternakan yang terpadu dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga bio gas. Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan adalah sulit mengembangkan energi listrik tenaga biomassa akibat kawasan peternakan yang tidak direncanakan secara terpadu dengan pembangkit listrik.

Dampak negatif peningkatan produksi hasil peternakan diikuti dengan pertumbuhan jumlah ternak yang berimplikasi pada kotoran ternak sehingga berdampak negatif terhadap pencemaran air tanah dan pencemaran Udara serta berpotensi terhadap alih fungsi lahan khususnya yang berfungsi lindung akan terjadi terutama pada peternakan rakyat yang melepaskan ternaknya untuk memenuhi pakannya sendiri.

Mitigasi. Pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas serta pengelolaan limbah cair peternakan dengan teknologi lingkungan tepat guna terutama pada kelompok-kelompok peternakan rakyat, serta pengembangan industri pakan ternak yang terjangkau peternakan rakyat.

Rekomendasi. dalam peta Pola ruang RTRW Kab/kota pemanfaatan ruang bagi lokasi peternakan secara eksplisit sebaiknya sudah diplotkan sebagai deliniasi kawasan budidaya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh isu strategis baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu diketahui dan difahami isu apa saja yang saat ini muncul di tingkat nasional maupun internasional (Tabel 3.3).

Isu strategis internasional. Di tingkat internasional saat ini terdapat 4 isu penting yang perlu difahami yaitu 1) Komitmen pencapaian pembangunan millenium (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1990; 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar Negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), EEC (*European Economic Community*), ASEAN (*Assosiation of Southeast Asian Nations*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), ACFA (*Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture*), G-8 (*Group of Eight : Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat [G6, 1975], Kanada [G7, 1976] dan Rusia [tidak ikut dalam seluruh acara], serta Uni Eropa*), dan lain sebagainya;

Tabel 3.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Komitmen pencapaian pembangunan Millenium (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB;	Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;	Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam	Daya saing produk peternakan masih rendah

			lokal;	
2	Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;	Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;	Impor produk peternakan masih tinggi
3	Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (<i>Global Warming</i>) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.	Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana)	Pengembangan kawasan peternakan sangat mendesak
4		Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara.	Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah untuk meningkatkan modal.	Peningkatan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
5				Skim kredit bunga ringan dengan prosedur mudah
6				Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan

3) Menguatnya penghormatan terhadap HAM (hak azazi manusia) yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum; 4) Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadi degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*global warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.

Isu strategis nasional. Dalam mengantisipasi isu internasional, maka terdapat 5 isu strategis nasional yang perlu difahami yaitu 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang difahami secara berbeda dan tidak terkendali dan menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah; 2) Banyaknya peraturan

perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan yang mengakibatkan sering terjadinya multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan; 3) Isu HAM yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; 4) Isu lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan; 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia melalui Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK pertama di Indonesia (PP 29/2012).

Isu Strategis Provinsi. Sejalan dengan pengaruh dari isu strategis internasional dan nasional, maka terdapat 13 isu strategis provinsi Sumatera Utara. Isu strategis tersebut meliputi 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan; 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah; 3) Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan social dan kinerja pelayanan social; 4) Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang; 5) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran; 6) Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditi unggulan berbasis sumberdaya alam lokal; 7) Belum optimalnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar

berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/pemukiman, air bersih, ketenaga listrikian, dan sanitasi lingkungan; 8) Masih diperlukan pengurangan kesenjangan antara wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial; 9) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah; 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi bencana alam (mitigasi bencana); 11) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM, serta ketentraman dan ketertiban; 12) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang perlu dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian, dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan; 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan sub-sektor peternakan di Sumatera Utara utamanya berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam, masih rendahnya daya saing ekonomi kerakyatan, dan masih rendahnya pemanfaatan hasil R&D dalam usaha peternakan. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam terlihat dari masih rendahnya daya saing sub-sektor peternakan baik dalam kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri. Selain itu, permasalahan inipun berkaitan dengan tingkat kesejahteraan petani peternak yang belum memenuhi standar hidup layak, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti jalan usaha tani dan pusat pemasaran produk, masih lemahnya kelembagaan petani peternak dan penyuluh di bidang peternakan, belum optimalnya penerapan teknologi, sarana informasi dan komunikasi, serta adanya ancaman kerusakan lingkungan akibat tata laksana peternakan yang kurang tepat.

Daya saing ekonomi kerakyatan yang masih rendah berkaitan dengan belum optimalnya fungsi kelembagaan koperasi dan UKM di bidang peternakan, dan belum optimalnya pengembangan kluster industri untuk mendukung hilirisasi produk

primer peternakan. Oleh karena itu, upaya pembentukan koperasi dan perusahaan pemula dengan menggandeng lembaga terkait harus dilakukan sehingga mampu menciptakan daya ungkit meningkatkan daya saing produk peternakan. Selain itu, pewilayahan komoditas peternakan unggulan perlu dilakukan dan diisi oleh industri hilirnya sehingga dapat mendorong berkembangnya industri primer yang diperlukan untuk memasok bahan bakunya.

Pembangunan subsektor peternakan perlu didukung oleh meningkatnya penerapan inovasi teknologi hasil R&D. Inovasi teknologi yang dipilih sebaiknya memenuhi kriteria sederhana, murah, efektif, dan ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan uji adaptasi terhadap kondisi biofisik dan sosial budaya sebelum dianjurkan untuk dipakai secara masal. Lembaga R&D seperti Balitbangda, BPTP, PTN dan PTS, dan Perusahaan Swasta sebaiknya berkerjasama untuk menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang tentunya sesuai untuk diterapkan di setiap kawasan industri peternakan di provinsi ini. Masalisasi penerapan teknologi diharapkan dikoordinasikan oleh Bakor Penyuluhan Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota berkerjasama dengan Dinas PKH Provinsi/Kabupaten/Kota. Peneliti dari lembaga R&D penghasil teknologi dapat digunakan sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan, dan juga melakukan pengawalan sehingga produktivitas yang dihasilkan tidak terlalu jauh menyimpang dari hasil penelitian/pengkajian.

Swasembada, dan Swasembada Berkelanjutan Daging Sapi dan Kerbau

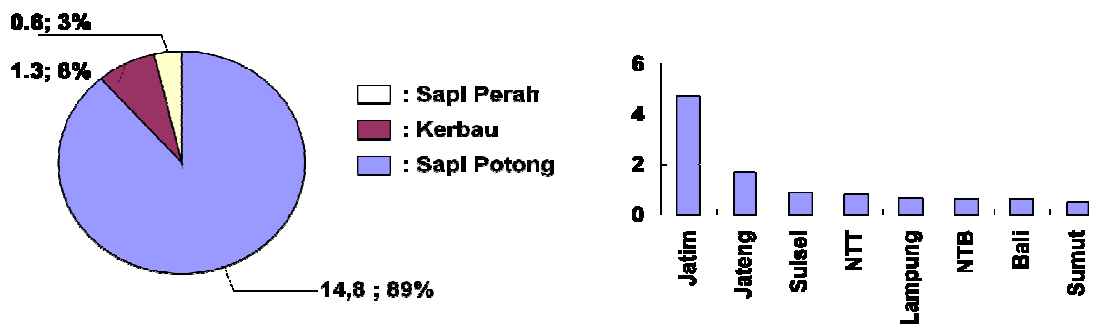
Pada tahun 2014, tingkat konsumsi daging sapi per kapita diproyeksikan berjumlah 2,24 kg/tahun, atau naik sekitar 6,1 %/thn, dan pada tahun 2018 tingkat konsumsi daging sapi per kapita diharapkan akan mencapai tingkat 2,85 kg/tahun. Pada tahun 2014, porsi daging impor dari total produksi daging sapi dibatasi menjadi 9,72% atau di bawah 10% yang menjadi prasyarat dicapainya swasembada. Sejak 2014 sampai dengan 2018, tingkat swasembada daging sapi diupayakan berlanjut.

Di Tingkat nasional, peningkatan konsumsi per kapita berdampak kepada total konsumsi daging sapi yang naik dari 417 ribu ton (tahun 2010) menjadi 562

ribu ton (tahun 2014). Proyeksi konsumsi ini diimbangi oleh produksi daging domestik yang diproyeksikan dari 196 ribu ton (tahun 2010) menjadi 507 ribu ton (tahun 2014). Secara bersamaan maka terjadi pengurangan jumlah pasokan daging impor dari 221 ribu ton (tahun 2010) menjadi hanya 55 ribu ton (tahun 2014), atau dengan tingkat pengurangan -28,6%/tahun. Pada tahun 2014, porsi daging ex impor ditargetkan pada tingkat 9,72% dari total pasokan daging. Target yang sangat berat dicapai, namun dengan kontribusi provinsi tentunya diharapkan dapat dicapai dengan baik.

Target produksi daging sapi tersebut juga memiliki implikasi terhadap peningkatan populasi baik sapi potong, perah, maupun kerbau. Populasi ternak sapi potong diharapkan meningkat dari 14,4 juta ekor (tahun 2010) menjadi 17,7 juta ekor (tahun 2014), atau dengan tingkat pertumbuhan 5,2%/tahun. Begitu juga sapi perah diproyeksikan meningkat dari 582 ribu ekor (tahun 2010) menjadi 697 ribu ekor (tahun 2014) dengan tingkat kenaikan 4,6%/tahun. Sementara itu tingkat kenaikan populasi kerbau diproyeksikan jauh lebih rendah yaitu 0,7% per tahun, peningkatan populasi dari 1,30 juta ekor (tahun 2010) menjadi 1,34 juta ekor (tahun 2014).

Hasil pendataan populasi sapi potong, sapi perah, dan kerbau (PSPK) yang dilakukan melalui sensus pada tahun 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi potong dilaporkan berjumlah 14,8 juta ekor (Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Populasi sapi potong, sapi perah, dan kerbau hasil PSPK 2011

Capaian populasi (14,8 juta ekor) tersebut masih dibawah target populasi sapi potong tahun 2011 yaitu 15,2 juta ekor, atau baru mencapai 97%. Target populasi sapi perah dan kerbau sudah bisa terpenuhi.

Sejalan dengan visi Dinas PKH, maka target pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau di Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan terwujud pada tahun 2014, dengan tingkat konsumsi daging sapi per kapita berjumlah 1,93 kg/tahun. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi daging sapi per kapita masyarakat provinsi Sumatera Utara ditargetkan untuk menyamai tingkat nasional yaitu 2,85 kg/tahun.

Proyeksi jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 adalah 13,9 juta jiwa, naik dengan kecepatan 1,24%/tahun (Tabel 3.4). Dengan tingkat konsumsi daging sapi per kapita sebesar 1,84 kg/tahun, maka kebutuhan terhadap daging sapi tahun 2014 adalah 25.562 ton/tahun.

Tingkat konsumsi daging kerbau per kapita ditetapkan pada tahun 2014 ditargetkan pada tingkat 0,55 kg/tahun. Oleh karena itu kebutuhan terhadap daging kerbau tahun 2014 adalah 7.669 ton/tahun.

Tabel 3.4. Proyeksi perkembangan konsumsi dan produksi daging sapi/kerbau, serta populasi sapi/kerbau tahun 2014 – 2018 di Sumatera Utara

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Konsumsi daging sapi	Kg/kap/th	1.84	1.89	1.94	1.99	2.03
2	Produksi daging sapi	Ton/th	25.661	26.708	27.755	28.801	29.847
3	Populasi sapi potong	Ekor	643.333	660.703	678.542	696.863	715.678
4	Konsumsi daging kerbau	Kg/kap/th	0.55	0.57	0.58	0.60	0.61
5	Produksi daging kerbau	Ton/th	7,669	7,981	8,294	8,607	8,919
6	Populasi kerbau	Ekor	132.326	132.749	133.174	133.600	134.028

Pada tahun 2018 proyeksi jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 14,6 juta jiwa. Menggunakan tingkat konsumsi daging sapi per kapita yang sudah mencapai 2,03 kg/tahun, maka kebutuhan terhadap daging sapi tahun 2018 adalah 29.731 ton/tahun. Menggunakan asumsi bahwa 18% dari total populasi dipotong per tahunnya, maka populasi ternak sapi adalah 1.126.424 ekor. Tingkat konsumsi daging kerbau per kapita ditetapkan pada tahun 2018 ditargetkan pada tingkat 0,61 kg/tahun. Oleh karena itu kebutuhan terhadap daging kerbau tahun 2018 adalah

8.919 ton/tahun. Menggunakan asumsi 18% dari total populasi dipotong setiap tahun, maka populasi ternak kerbau pada tahun 2018 minimal harus mencapai 263.472 ekor.

Pengembangan Bibit Ternak

Bibit ternak adalah bibit yang memiliki mutu genetik tinggi dan sifat ini siap diturunkan kepada keturunannya. Pengembangan bibit ternak di Sumatera Utara didukung oleh faktor kekuatan yang meliputi, rekognisi pusat sebagai wilayah pengembangan bibit sapi potong PO, cukup luasnya lahan pengembangan ternak, cukup banyaknya perusahaan pembibitan ternak, dan populasi ternak yang cukup tinggi. Kekuatan ini juga didukung oleh adanya peluang bahwa terdapat kredit pembibitan yang cukup besar yang disediakan pihak perbankan, selain adanya dukungan program dari pusat yang cukup besar dan berkelanjutan.

Namun demikian, juga teridentifikasi adanya beberapa kelemahan yang meliputi kurang tersedianya bibit unggul yang berkualitas, belum memadainya jumlah dan kualitas straw/sperma untuk mendukung program IB, perkawinan alam yang di tingkat peternakan rakyat belum terkendalikan dengan baik, seleksi terhadap induk dan turunannya masih belum dilakukan dengan baik, dan kredit perbankan untuk pembibitan ternak belum termanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, sampai saat ini belum terlihat adanya zonasi pusat pembibitan ternak yang jelas, sehingga menyulitkan penetapan fokus pengembangan di suatu daerah. Pengembangan bibit juga mendapatkan ancaman berupa adanya bibit berkualitas yang dijual ke luar provinsi, dan masih adanya pemotongan betina produktif. Sementara itu, kelompok tani ternak yang ada terlihat kurang motivasi sehingga sangat peka terhadap guncangan internal maupun external.

Berdasarkan bahasan di atas, maka strategi pengembangan bibit yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu genetik ternak yang disesuaikan dengan zonasi yang sebelumnya ditetapkan. Misalnya, pusat pembibitan ternak sapi potong PO telah ditetapkan di Kabupaten Simalungun, dan Serdang Bedagai. Di tempat ini sebaiknya ditetapkan kelompok-kelompok ternak yang sepakat menjadi pusat

pembibitan ternak di perdesaan (Village Breeding Center atau VBC). Untuk setiap VBC ini dilakukan seleksi induk berdasarkan ciri-ciri induk PO yang baik. Sistem perkawinan dapat dilakukan melalui IB atau kawin alam, yang keduanya menggunakan sperma atau pejantan PO unggul. Perkawinan alam yang terjadi sebaiknya dikendalikan, misalnya dengan menerapkan kebijakan kawasan bebas pejantan.

Pada komoditas ternak ayam buras, pengembangan bibit unggul seperti ayam "KUB" atau Kampung Unggul Balitnak sebaiknya dilakukan di setiap VBC ayam buras yang sebelumnya ditetapkan. Ayam KUB dikenal dengan produktivitas telurnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kampung biasa.

Selain ayam buras, pengembangan bibit itik juga perlu diperhatikan. Itik unggul petelur seperti itik Mojosari Alabio (MA) hasil penelitian Badan Litbang Pertanian cukup baik untuk dikembangkan.

Untuk ayam ras petelur dan pedaging, bibit unggul yang biasanya dipasok oleh perusahaan ternak besar harus dijaga kelangsungannya. Umumnya, kemitraan antara perusahaan tersebut dengan para peternak sudah berjalan dengan baik.

Perbaikan mutu genetik kambing sudah dilakukan dengan mengembangkan kambing "Boerka" yang merupakan kambing pedaging. Pengembangan lebih lanjut dari kambing tersebut perlu segera dilakukan di VBC kambing Boerka yang sebelumnya ditetapkan. Program seleksi yang disertai perkawinan yang terkendali akan membentuk kelompok ternak dengan mutu genetik tinggi. Selain tipe pedaging, pembibitan kambing tipe perah juga perlu dikembangkan. Sampai saat ini belum tersedia VBC kambing perah sehingga cukup menyulitkan bagi petani ternak untuk mendapatkan bibit hasil seleksi.

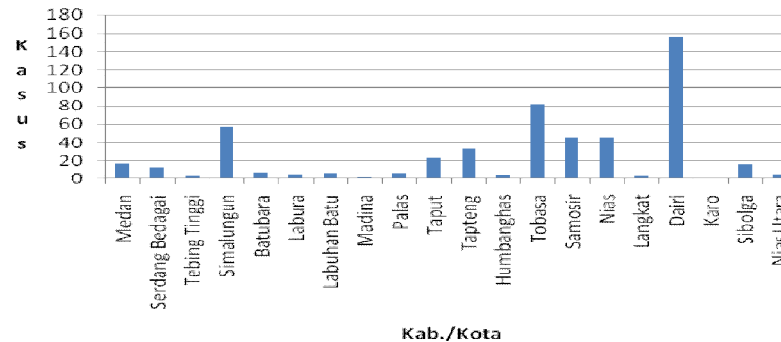
Secara keseluruhan, dalam pengembangan bibit ternak perlu ditetapkan a) zona komoditas ternak unggulan, dan b) VBC. Target produk dari VBC tentunya bibit hasil seleksi yang bermutu tinggi, baik sebagai calon induk ataupun sebagai calon pejantan. Hal ini perlu didukung oleh unit sertifikasi bibit yang melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, kebijakan berupa Perda diperlukan untuk mengatur suatu wilayah pembibitan berbasis kawin alam sehingga perkawinan

hanya terjadi dengan menggunakan pejantan terpilih. Pada kawasan pembibitan yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB), ketersediaan dan distribusi sperma beku berkualitas sesuai dengan bangsa ternak yang akan dikembangkan perlu dijamin kontinuitasnya.

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan PHMS.

Terdapat beberapa Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) termasuk rabies, hog cholera, flu burung, brucellosis, dan antrax.

Rabies. Rabies adalah penyakit ensephalitis yang bersifat akut, progresif dan hingga saat ini belum ada obatnya yang disebabkan oleh virus rabies yang sudah sangat lama dikenal manusia sebagai penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Rabies dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas, rabies pada manusia selalu dihubungkan dengan anjing karena lebih dari 90% infeksi pada manusia disebabkan oleh gigitan anjing. Pada tahun 2010, kasus gigitan anjing dilaporkan terjadi di 21 kab/kota (Gambar 3.2).



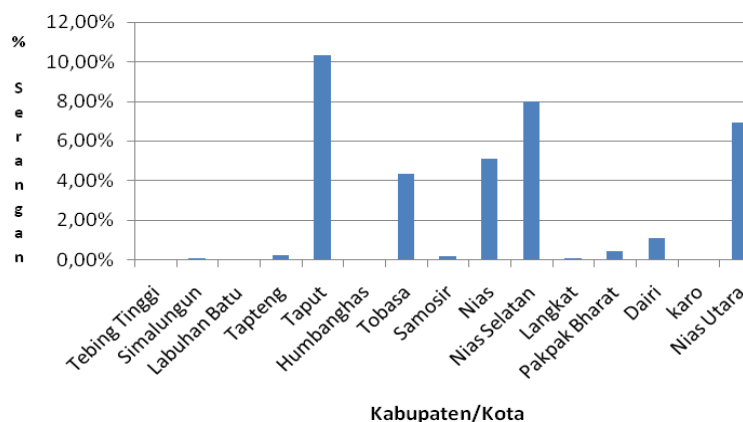
Gambar 3.2. Kasus gigitan anjing

Kasus gigitan anjing paling banyak terjadi di kabupaten Dairi, Tobasa, dan Simalungun, Nias, dan Samosir. Terdapat 157 kasus gigitan anjing di kabupaten Dairi, selanjutnya 82 kasus di kab. Tobasa, 58 kasus di kab. Simalungun, Nias dan Samosir masing-masing dilaporkan terjadi 46 kasus gigitan anjing.

Namun demikian, pengendalian rabies terlihat sudah intensif dilakukan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2010 telah dilakukan distribusi vaksin rabies ke 33 kabupaten/kota yang berkisar antara 500 – 2.500 dosis dengan total vaksin

sebanyak 43.000 dosis. Jumlah dosis tersebut termasuk vaksin yang disimpan di Provinsi (3.550 dosis) untuk melayani kebutuhan darurat.

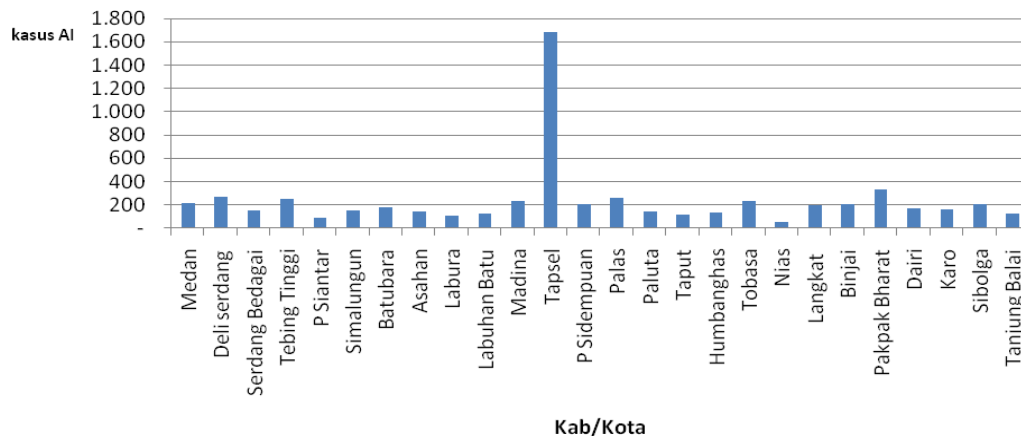
Hog Cholera (HC). Jumlah serangan Hog Cholera dilaporkan paling banyak di kabupaten Tapanuli Utara, Nias Selatan, Nias Utara, Nias dan Tobasa (Gambar 3.3). Pada tahun 2010, di kabupaten Tapanuli Utara dilaporkan serangan hog cholera sejumlah 1.748 ekor atau 10,3% dari populasi, dan dalam jumlah yang cukup banyak juga juga dilaporkan di Kabupaten Nias Selatan yaitu 1.560 ekor atau sekitar 8,0% dari populasi. Pengendalian Hog Cholera (HC) di Sumatera Utara diprioritaskan pada daerah-daerah padat populasi babi atau daerah sumber bibit babi. Pelaksanaan vaksinasi dan pemeriksaan titer anti body dilakukan secara rutin untuk mengetahui gambaran dan kekebalan penyakit pada ternak babi.



Gambar 3.3. Serangan cholera (prevalensi) pada ternak babi

Selain dua kabupaten tersebut, kasus serangan hog cholera yang cukup tinggi juga dilaporkan di Nias Utara dengan 750 kasus atau sekitar 6,9% dari populasi. Namun demikian, distribusi vaksin untuk hog cholera ternyata belum sejalan dengan jumlah kasus serangan yang ada. Misalnya pada tahun 2010, untuk Tapanuli Utara diberikan vaksin HC sejumlah 1.500 dosis, padahal jumlah serangan adalah tertinggi yaitu 1.748 ekor. Selain itu, untuk Nias Selatan yang dilaporkan mendapat serangan HC sejumlah 1.560 ekor hanya diberikan vaksin sejumlah 200 dosis. Oleh karena itu, distribusi jumlah vaksin yang proporsional sejalan dengan jumlah kasus serangan HC yang ada sebaiknya dilakukan.

Flu Burung (Avian Influenza, AI). Penyakit Avian Influenza (AI) pertama-tama ditemukan di Sumatera Utara pada bulan Juli 2005 di kabupaten Simalungun. Penyakit ini menular dengan cepat di beberapa kabupate/kota, dan pada tahun 2010 dilaporkan terbanyak di kab. Tapanuli Selatan dimana terdapat 1.682 kasus (Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Kasus Flu Burung (AI) di Sumut pada tahun 2010.

Selain Kabupaten Tapanuli Selatan, kasus AI juga dilaporkan terjadi di banyak kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Penanggulangan dan Penanganan dilakukan dengan pelaksanaan vaksinasi dan desinfeksi (sanitasi kandang) dan pelaksanaan “local culling” atau pemusnahan terbatas disekitar titik kasus ditemukan. Pelaksanaan local culling dilakukan jika pengamatan dan uji rapid tes positif pada bangkai yang yang mati mendadak.

Namun demikian, pengendalian AI pada tahun 2010 belum memadai, hal ini ditunjukkan oleh minimalnya antigen AI yang disebarkan. Hanya terdapat 240 test Antigen AI yang dibagikan ke 12 kabupaten/kota.

Penyakit Ngorok (SE). Penyakit SE (Septichaema epizootica) atau shipping fever yang disebabkan oleh bakteri *Pasteurella multocida* atau *P. Haemoyitica* ternyata pada tahun 2010 juga dilaporkan menyerang di 12 kabupaten/kota. Namun demikian, serangan tertinggi terjadi di kabupaten Nias Selatan yaitu dengan 313 kasus. Serangan di kabupaten/kota lainnya dilaporkan hanya berkisar antara 1-74 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit SE cukup berhasil.

Penyakit ND. Penyakit tetelo atau ND (Newcastle Disease) merupakan jenis penyakit yang telah lama dikendalikan. Namun demikian, data tahun 2010 menunjukkan bahwa masih terdapat serangan ND sejumlah 38.864 kasus di 21 kabupaten/kota.

Brucellosis (Gangguan Reproduksi). Penanggulangan gangguan reproduksi dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada sapi potong, yang kemudian dilakukan tindakan pemeriksaan dengan RBT untuk mengetahui apakah ada sampel yang positif atau tidak dari hasil pemantauan selama 3 tahun terakhir di Kabupaten/Kota tidak ditemukan positif Brucellosis sehingga Sumatera Utara mengarah kepada bebas Brucellosis.

Anthrax dan PMK. Penyakit Anthrax (Radang Limpa) merupakan penyakit zoonosis yaitu mampu menyerang manusia. Sementara itu, penyakit mulut dan kuku (PMK) atau *Apthae epizootica* (AE) disebabkan oleh virus *Rhinovirus*. Sampai saat ini Sumatera Utara dinyatakan bebas dari kedua penyakit berbahaya ini. Namun demikian, monitoring dan pengendalian yang intensif sangat diperlukan agar tetap dapat mempertahankan Sumut sebagai provinsi yang bebas kedua penyakit tersebut. Bebasnya suatu wilayah dari anthrax dan PMK akan meningkatkan potensi daya jual ternak dari wilayah tersebut.

Pakan Ternak.

Pengembangan pakan ternak di Sumatera Utara sangat memungkinkan karena adanya faktor kekuatan yang meliputi a) adanya bahan baku pakan yang cukup berlimpah, b) tersedianya SDM peternakan yang cukup banyak, c) jumlah ternak yang cukup banyak, dan d) semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pakan ternak. Selain itu, pengembangan pakan ternak juga didukung oleh adanya peluang berupa a) cukup banyaknya lahan pengembangan, dan b) tersedianya skim kredit usaha peternakan.

Namun demikian, kekuatan dan peluang tersebut menghadapi tantangan berupa kelemahan dan ancaman terhadap pengembangan pakan. Kelemahan yang telah diidentifikasi meliputi a) masih rendahnya tingkat penerapan teknologi, b)

kurangnya kebijakan pendukung, c) rendahnya produktivitas ternak, d) kurang menyebarnya populasi ternak, dan e) kurangnya koordinasi antara SKPD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, ancaman pengembangan pakan ternak yang dapat dikenali adalah a) masih terjadinya ekspor bahan pakan, dan b) dan berfluktuasinya ketersediaan pakan.

Berdasarkan fakta di atas, maka strategi pengembangan pakan sebaiknya adalah dengan memanfaatkan bahan baku pakan yang berlimpah, yang didukung oleh peningkatan penerapan teknologi. Bahan baku pakan yang melimpah ini didapatkan dari berbagai ekosistem meliputi tanaman pangan, dan perkebunan.

Limbah pertanian, perkebunan dan agro-industrinya memiliki potensi yang besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia. Beberapa permasalahan pemanfaatan hasil ikutan pertanian sebagai pakan ternak adalah nilai nutrisinya yang rendah, penyimpanannya banyak menyita tempat dan cepat rusak. Pengembangan agribisnis sapi potong sebaiknya diarahkan pada budidaya peternakan yang menerapkan model LEISA terutama melalui Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT, Maryono dkk., 2009). SITT antara ternak dengan tanaman pangan maupun perkebunan diyakini dapat menurunkan biaya produksi melalui optimalisasi pemanfaatan hasil ikutan pertanian, perkebunan dan agro-industri setempat dan sedikit mungkin menggunakan pakan tambahan yang berasal dari luar. Optimalisasi penggunaan bahan pakan hasil ikutan tanaman pertanian dan perkebunan yang potensial diharapkan dapat menurunkan biaya ransum namun tetap mampu meningkatkan produktivitas ternak sapi potong.

Manfaat hasil ikutan tanaman pertanian, perkebunan dan agro-industri sangat dirasakan pada saat : (1). Jumlah ternak yang diusahakan banyak; (2). Musim sulit pakan (kemarau); (3) Tenaga kerja terbatas (musim tanam, panen, dll.), dan (4). Lahan pertanian dibudidayakan secara intensif.

Tanaman Padi (*Oryza sativa*). Hasil ikutan tanaman padi adalah jerami, dedak dan sekam, untuk setiap ton gabah yang dipanen menyisakan jerami padi sekitar 1,35 ton (Putun dkk., 2004). Proses penggilingan gabah kering akan menghasilkan sekitar 10 % dedak, 2 % menir (beras yang rusak/hancur), dan 24-25

% sekam (Kariyasa, 2006). Jerami padi merupakan pakan sumber serat sedangkan dedak dapat berfungsi sebagai sumber serat dan/atau energi. Sekam tidak umum digunakan sebagai pakan karena kadar lignin tinggi dan terikat oleh silika sehingga sulit tercerna serta tidak disukai ternak.

Berbagai perlakuan terhadap jerami padi untuk meningkatkan nilai gizi telah banyak digunakan, namun bagi peternak kecil tampaknya suplementasi dengan sisa hasil agro-industri pertanian ataupun tanaman leguminosa merupakan pilihan yang mudah diterapkan (Martawijaya, 2003). Pemberian jerami padi fermentasi *ad-libitum* bersama 4-5 kg konsentrat per ekor per hari pada sapi penggemukan mampu menghasilkan pertambahan bobot badan sebesar 0,72 kg/ekor/hari (Anggraeny dan Umiyasih, 2004).

Dedak sudah umum dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dimana nilai nutrisinya bervariasi tergantung pada jenis padi dan jenis mesin penggiling. Umumnya, semakin baik kualitas dedak padi, semakin mudah tengik. Kualitas dedak padi yang baik mudah terkontaminasi oleh bakteri dan jamur penghasil enzim lipase. Enzim tersebut menguraikan minyak dalam dedak padi menjadi asam lemak mudah terbang yang berbau tengik sehingga kurang disukai ternak (Mathius dan Sinurat, 2001), lebih lanjut disebutkan bahwa dedak mengandung zat antinutrisi *myoinositol* (asam fitat) yang menghambat ketersediaan mineral dalam ransum. Pada usaha pembibitan dan penggemukan, dedak padi dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 100%, terutama dedak padi kualitas baik yang biasa disebut dengan pecah kulit (PK) 2 dan sparator, yaitu dedak padi yang dihasilkan pada penggilingan padi tahap ke-dua menggunakan mesin penyosoh (*polisher*), terutama pada penyosohan ke-dua, karena dedak ini tidak tercampur dengan serpihan sekam (Widowati, 2001).

Tanaman ubi kayu (*Manihot utilissima*). Pada pemanenan tanaman ubi kayu dihasilkan 50 % umbi, 44 % batang dan 6 % daun (Devendra, 1977). Daun ubi kayu umum digunakan sebagai pakan ruminansia sementara batangnya untuk kayu bakar (Saono dan Sastrapradja, 1983). Andrizal (2003), melaporkan bahwa di Indonesia sebagian besar ubi kayu digunakan untuk pangan (54,2%), sisanya untuk

bahan baku industri, seperti industri tepung tapioka (19,7%), industri pakan ternak (1,8%) dan industri non pangan lainnya (8,5%), serta diekspor (15,8%). Asam sianida (HCN) adalah zat anti nutrisi utama yang dapat ditemukan pada daun dan umbi ubi kayu. Kandungan asam sianida dalam daun singkong sangat tinggi, antara 400-600 ppm (Mathius dan Sinurat, 2001).

Semua hasil ikutan pemrosesan ubi kayu baik kering maupun basah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, diantaranya adalah kulit umbi, onggok (gamblong), gaplek (*cassava chips*) afkir dan sebagainya. Sering kali ubi kayu sengaja diproses sebagai bahan pakan sapi dalam bentuk gaplek dan pelet, bahan ini biasanya merupakan komoditas ekspor.

Bahan pakan asal ubi kayu tergolong sebagai sumber karbohidrat yang mudah dicerna. Hasil penelitian telah banyak membuktikan, bahwa bahan pakan asal ubi kayu mempunyai manfaat biologis yang lebih baik dibandingkan dengan dedak padi kualitas rendah sampai sedang.

Tanaman Kedelai (*Glycine soya*). Jerami kedelai jarang digunakan sebagai pakan, diduga karena proses pemanenan kedelai mengharuskan jerami dikeringkan. Jerami kedelai kering bertekstur keras dan berdebu sehingga tidak disukai ternak, bahkan sapi yang diberi pakan tunggal jerami kedelai bobot badannya menurun (FFTC, 2008). Kedelai merupakan salah satu bahan pakan yang bernilai biologis tinggi. Penggunaan kedelai sebagai pakan ternak ruminansia belum umum digunakan di Indonesia karena harganya mahal, bersaing dengan kebutuhan pangan dan ternak monogastrik. Hasil ikutan kedelai yang banyak digunakan sebagai pakan ternak ruminansia adalah kulit buah (polong), batang dan kulit polong, kulit ari biji, ampas tahu, ampas kecap dan kedelai afkir. Mathius dan Sinurat (2001) melaporkan bahwa nutrisi ampas tahu sangat bervariasi tergantung cara yang digunakan dalam pembuatan tahu. Kandungan protein yang tinggi (23-29 %) dengan kadar air yang tinggi dari ampas tahu, merupakan kendala dalam pendistribusiannya, sehingga sangat disarankan untuk dikeringkan terlebih dahulu. Ampas tahu, dan kulit ari biji sangat baik diberikan pada sapi menyusui atau penggemukan; dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 75 %. Namun

demikian, bahwa untuk sapi penggemukan, pemberian ampas tahu dalam waktu yang lama (>6 bulan) dan dalam jumlah banyak (konsumsi BK ampas tahu \geq 1% dari bobot badan sapi) dapat mengakibatkan tekstur daging kurang padat dan berlemak. Siregar dan Nurhasanah (1986) dalam Mathius dan Sinurat (2001) melaporkan penggunaan ampas tahu sebagai pengganti bungkil kelapa (pada level 32 % konsentrat), menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan bungkil kelapa dalam konsentrat. Imai *dkk.* (1996) dalam Mathius dan Sinurat (2001) mencampurkan 20 % ampas tahu dalam konsentrat komersial pada penggemukan sapi mampu menghasilkan pertambahan bobot badan 1,10 kg/ekor/hari tidak berbeda dengan yang menggunakan konsentrat komersial.

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum*). Hasil ikutan tanaman tebu merupakan pakan sumber serat atau energi; yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia adalah daun tebu, ampas tebu (bagase), blotong (kotoran yang terpisah saat penapisan nira tebu) dan tetes (molases). Yang termasuk daun tebu adalah pucuk tebu, momol (sebagian pupus dari pucuk tebu), daun klentekan (daun tebu yang diperoleh dari pelepasan 3-4 lembar daun pada saat tebu berumur 4, 6 dan 8 bulan; masing-masing disebut klentekan 1, 2 dan 3 dan tunas tebu yang diafkir, sering disebut dengan sogolan, yaitu tunas-tunas baru yang tumbuh yang biasanya disebabkan oleh robohnya batang tebu pada perkebunan beririgasi baik (Silitonga, 1983). Pemberian pucuk tebu selama empat minggu pada pedet sapi Bali lepas sapih mampu meningkatkan konsumsi bahan kering pakan (30,77 %) dan efisiensi pakan (14,50 %) dibandingkan pemberian rumput gajah, selama empat minggu pucuk tebu mampu meningkatkan bobot badan 7,1 kg sedangkan rumput gajah meningkat sebesar 4,7 kg (Rangkuti dan Djajanegara, 1983). Wafer daun tebu kering belum banyak digunakan oleh peternak dalam negeri, namun telah banyak diekspor untuk usaha peternakan di Jepang dan Korea. Ampas tebu banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan media budidaya jamur. Tetes telah umum digunakan sekitar 5 – 7 % yang berfungsi sebagai perekat pakan, dan penambah kesukaan (palatabilitas).

Hijauan pakan ternak (HPT) sumber protein yang dapat dikembangkan berupa legum herba atau legum pohon. Untuk kondisi lahan pertanian intensif, legum pohon lebih sesuai karena dapat dikembangkan dalam bentuk pagar hidup yang ditanam memanjang batas lahan ataupun di sekeliling kandang.

Legum Gamal (*Gliricidia sepium*). Legum pohon ini tumbuh baik pada daerah dengan curah hujan 900 – 1500 mm per tahun dengan lima bulan kering setahun. Namun terbukti tumbuh baik juga di daerah dengan curah hujan 3500 mm per tahun tanpa musim kemarau panjang. Toleran terhadap tanah masam dan alkalin, namun memerlukan kesuburan sedang (Skerman dkk, 1988 dalam Ibrahim, 2009).

Tanaman berumur 1 tahun menghasilkan bahan kering 3-4 kg sekali panen. Pada jarak tanam 0,5 m x 0,5 m bisa menghasilkan hijauan segar sampai 43 t/ha/tahun. Kandungan protein pada daun 19-25%, serat kasar 13-30%. Daun gamal mempunyai kualitas tinggi sebagai pakan ternak, dan disukai ternak ruminansia. Namun demikian, kadang-kadang perlu waktu untuk disukai karena baunya yang tidak enak, oleh karena itu perlu pelayuan.

Legum lamtoro (*Leucaena leucocephala*). Legum pohon ini tumbuh di daerah dataran rendah sampai 1000 m dpl, namun ada juga kultivar yang bisa tumbuh pada ketinggian lebih dari 1500 m dpl. Curah hujan yang ideal 650 – 1500 mm per tahun tapi ada juga yang tumbuh di tempat yang lebih kering atau lebih basah. Kemasaman tanah yang cocok adalah pH > 5, dan legum ini kurang toleran terhadap Al, tapi masih bisa tumbuh pada salinitas tinggi, dan tanaman ini tidak menyukai tanah yang tergenang (Skerman dkk, 1988 dalam Ibrahim, 2009). Hasil bahan kering hijauan berkisar antara 1 – 15 t/ha tergantung pada, kesuburan tanah, curah hujan, dan cara pemangkasan. Semakin sering dipangkas hasilnya semakin berkurang. Daunnya merupakan pakan yang berkualitas tinggi terutama pada musim kemarau.

Pengembangan pakan ternak perlu didukung oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternakan. Oleh karena itu, pelatihan, dan magang bagi para petugas perlu dilakukan. Pada saat yang tidak terlalu lama,

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh petugas perlu ditularkan melalui praktek, dan percontohan yang dilakukan secara partisipatif bersama petani ternak. Pada saat yang sama, kerjasama yang baik perlu direncanakan dan diwujudkan dengan berbagai SKPD terkait seperti Badan Penyuluhan, BPTP, Dinas Koperasi, dan SKPD lainnya yang memiliki kepentingan yang serupa.

Ketersediaan Pangan Hewani.

Pangan hewani adalah produk asal hewan yang dijadikan konsumsi manusia seperti daging, telur, dan susu. Pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sudah diupayakan untuk dijamin ketersediaannya. Namun demikian, masih sering terjadi kendali pengawasan yang kurang ketat terhadap kesehatan hewan baik *ex ante* maupun *post mortem*, utamanya pada hari-hari besar keagamaan. Masih sering dijumpai ternak dipotong dalam kondisi yang belum layak. Untuk itu, ke depan perlu dibuat SOP (prosedur operasi standar) tentang pengawasan terhadap pemotongan ternak pada hari-hari tersebut yang diterapkan dalam rangka membangun otoritas veteriner.

Keterbatasan pengawasan juga berkaitan dengan masih sedikitnya petugas kesmavet di kabupaten/kota, terutama di tempat-tempat pemotongan, dan pasar tradisional. Oleh karena itu, peningkatan jumlah petugas Kesmavet perlu menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan SDM petugas Kesmavet juga perlu didukung oleh sosialisasi yang intensif tentang pentingnya pangan hewani yang ASUH bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya sinergi antara petugas dan masyarakat dalam menyediakan produk pangan hewani yang ASUH.

Sumber Daya Manusia

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masa kini dan masa yang akan datang memerlukan sumber daya manusia peternakan yang lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena pembangunan peternakan dihadapkan kepada persaingan global yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu. Mereka telah mampu menawarkan produk dan jasa secara lebih profesional, kualitas lebih baik dan harga lebih murah.

Sumber daya manusia peternakan terdiri dari para peternak dan aparat pembina mulai dari pusat hingga ke daerah meliputi perencana, pelaksana, peneliti dan penyuluh serta aparat pelaksana lain yang terkait tetapi berada di luar jajaran peternakan dan kesehatan hewan. Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting dan perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pemabangunan peternakan. Manusia adalah kekuatan utama sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan. Sebagai kekuatan utama dan pelaku, manusia merupakan salah satu faktor produksi yang diharapkan mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, sedangkan sebagai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan, manusia harus menikmati kesejahteraan dari hasil pembangunan tersebut.

Demikian penting dan strategisnya posisi sumber daya manusia, sehingga secara terus-menerus perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitasnya melalui peningkatan efektifitas pendidikan, penyuluhan dan pelatihan, mengembangkan keterpaduan antar sub sistem dalam sistem agribisnis dan kesehatan hewan nasional, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan formal dan informal.

Peningkatan sumber daya manusia dapat diukur secara kuantitas dari peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga peternak serta peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi, sedangkan secara kualitas dicerminkan oleh peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, penguasaan kualitas keterampilan, semangat dan etos kerja, disiplin dan tanggung jawab.

Arah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peternakan. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu kepada pendekatan sistem agribisnis dan sistem kesehatan hewan nasional sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diperlukan kualifikasi sumber daya manusia peternakan yang memiliki perilaku sebagai berikut:

-
- a. Berperilaku sistem agribisnis dan kesehatan hewan serta diversifikasi, dengan titik berat pendapatan dan kesejahteraan untuk mencapai swasembada pangan hewani dalam arti kualitas. Perilaku ini mengandalkan teknologi sumber daya dan produktivitas pertenaga kerja dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam,
 - b. Berperilaku mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan alat dan mesin yang efektif dan efisien,
 - c. Berperilaku kemitraan dan partisipatif, yang bertindak sebagai pelayan, pendamping dan fasilitator,
 - d. Berperilaku mementingkan kualitas,
 - e. Berperilaku dan berbudaya disiplin terhadap pekerjaan.

Untuk itu arah peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan tahun 2013 – 2018 melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia peternakan yang berkualitas tinggi dengan mengembangkan perilaku – perilaku tersebut diatas dengan berbagai cara dan media yang tepat sehingga memenuhi kemandirian untuk berkompetisi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam peternakan secara optimal dalam rangka pengembangan sistem agribisnis terpadu dan terintegrasi yang ditopang oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan azas keseimbangan, keselarasan, keterpaduan antar setiap pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, perlu ditingkatkan kualitas kemandirian sumber daya manusia peternakan meliputi kualitas moral, kualitas intelektual, kualitas profesional serta kualitas fisik prima.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Utara mendapat prioritas yang akan dilakukan melalui pendidikan kedinasan, pelatihan petugas, penyuluhan dan pelatihan peternak dengan berbagai metoda dan media yang tepat mengacu kepada strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas aparatur peternakan dan kesehatan hewan, pendayagunaan aparatur, tenaga terdidik dan peternak dalam membangun dan mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan, serta

-
- meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan sumber daya manusia (inovasi, partisipasi, kerjasama, orientasi pasar) peternak,
- b. Dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2013-2018 dan setiap tahapnya mempunyai tujuan yang jelas dan terukur,
 - c. Sasaran utama pembangunan sumber daya manusia adalah pengembangan agribisnis peternakan dan kesehatan hewan nasional dengan mempercepat proses transformasi struktur sosial ekonomi dengan memperhatikan sumber-sumber potensi spesifik lokasi,
 - d. Peningkatan mutu aparatur melalui pendidikan dan latihan dilaksanakan untuk pengembangan profesionalisme sehingga mampu menciptakan iklim yang mendorong prakarsa dan swadaya peternak, serta mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara.
 - e. Peningkatan mutu hasil pendidikan menengah dan pendidikan tinggi peternakan harus mampu mengantisipasi peningkatan mutu peternak, pengembangan agribisnis dan kesehatan hewan, perkembangan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja pada bidang peternakan,
 - f. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia peternakan dengan arah terwujudnya sistem agribisnis dan kesehatan hewan dicirikan oleh peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang lebih besar,
 - g. Peningkatan mutu sumber daya manusia peternakan dalam jangka panjang meliputi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dan diterapkan oleh aparatur dan peternak, budaya kerja, disiplin dan tanggung jawab, kelembagaan yang transparan, serasi dan berimbang dalam pembagian risiko dan keuntungan dan nilai gizi yang dinamis,
 - h. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia peternakan perlu diselaraskan dengan pengembangan infrastruktur pedesaan dan potensi sumber-sumber pembangunan peternakan spesifik lokasi,

-
- i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan perlu diselaraskan dengan keahlian dan potensi yang dibutuhkan, sehingga sumber-sumber pembiayaan yang tersedia dapat didayagunakan sebaik-baiknya dalam mengupayakan tranformasi struktur sosila ekonomi pedesaan,

Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan sumber daya manusia peternakan yang berkesinambungan yang didasarkan atas kebutuhan nyata pengembangan tenaga kerja produktif serta terampil/profesional.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Sejalan dengan hasil telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hasil analisis SWOT (Lampiran 3 sd 10), maka visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Ternak yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sehat, Mandiri dan Sejahtera”.

Makna atas pernyataan visi tersebut adalah a) Terwujudnya, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah pencapaian swasembada daging, telur, dan susu yang berkelanjutan; b) Berdaya saing, bermakna kondisi perekonomian dan social kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdayasaing dan menuju terbaik; c) Sehat, bermakna tercukupinya kebutuhan gizi utamanya melalui pangan asal ternak yang bersifat ASUH; d) Mandiri, bermakna masyarakat melakukan usaha peternakan dengan memanfaatkan sumberdaya local yang dimiliki; dan e) Sejahtera, bermakna masyarakat peternakan memiliki pendapatan perkapita riil dan NTP yang lebih baik dari nasional, dan menikmati hasil pembangunan peternakan.

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 4 misi yaitu Misi-1 : Menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas yang berdaya saing; Misi-2 : Memberdayakan sumber daya manusia dan teknologi peternakan secara optimal; Misi-3 : Menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat; Misi-4 : Menciptakan lapangan pekerjaan dibidang agribisnis peternakan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Utara yaitu terwujudnya swasembada pangan asal ternak yang berkelanjutan dan berdayasaing menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan

sejahtera, maka telah ditetapkan 4 misi. Keempat misi tersebut adalah, 1) menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas yang berdaya saing, 2) memberdayakan sumberdaya manusia dan teknologi peternakan secara optimal, 3) menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat, 4) menciptakan lapangan pekerjaan di bidang agribisnis peternakan.

Misi-misi tersebut dijabarkan kepada 4 tujuan yaitu 1) terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industry dan ekspor, 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan, 3) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak, 4) ketersediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dirumuskan dalam Lampiran 12.

Tujuan pertama memiliki sasaran berupa meningkatnya populasi ternak dan produksi serta daya saing dengan indicator berupa peningkatan produksi daging (3,85%/thn), telur (3,99%/thn), dan susu (7,89%/thn).

Tujuan ke-dua memiliki sasaran meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan, dengan indicator berupa peningkatan jumlah akseptor (8,87%/thn) dan kelahiran IB (9,09%/thn).

Tujuan ke-tiga memiliki sasaran meningkatnya Nilai Tukar Petani Peternak (NTP) dengan indicator peningkatan NTP sub-sektor peternakan sebesar 0,59%/thn.

Tujuan ke-empat dengan sasaran meningkatnya kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB. Namun demikian persentase kontribusi Sub-sektor peternakan terhadap PDRB diprediksikan akan menurun sebesar -2,31%/thn yang diakibatkan oleh meningkatnya kontribusi sub-sektor lain secara signifikan.

Sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya populasi ternak
- 2) Meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan

-
- 3) Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)
 - 4) Meningkatnya nilai tukar petani peternak
 - 5) Persentase kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak	Meningkatnya nilai tukar petani peternak	NTP sub sektor peternakan (%)	107,32	107,51	108,30	109,09	109,88
2.	Terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor	2. Meningkatkan produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)	Produksi daging (Ton)	141.687,22	147.463,43	153.239,65	159.015,87	164.792,09
			Produksi telur (Ton)	139.363,38	145.262,50	151.161,63	157.060,75	162.959,87
			Produksi susu (Ton)	835,17	909,29	983,42	1.057,54	1.131,67
2.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan	Meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan	Jumlah akseptor Inseminasi Buatan (Ekor)	56.000,00	61.830,00	67.441,00	73.054,00	78.670,00
			Jumlah kelahiran Inseminasi Buatan (Ekor)	40.000,00	44.518,00	48.558,00	52.599,00	56.642,00
4.	Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,97	1,81	1,82	1,80	1,79

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi-1. Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak dengan pemanfaatan teknologi, Peningkatan ketersediaan dan perbaikan mutu benih dan bibit ternak, Peningkatan ketersediaan dan perbaikan mutu benih dan bibit ternak, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi.

Arah Kebijakan – Kebijakan umum diarahkan kepada a) Meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; b) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; c) Meningkatkan produksi pakan ternak; d) Meningkatkan status kesehatan hewan.

Strategi- 2 : Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan, Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya local, Optimalisasi IB, Pencegahan dan pengamanan bahaya pencemaran produk hewan, zoonosis dan produk rekayasa genetik, serta peningkatan penerapan kesejahteraan hewan.

Arah Kebijakan. Kebijakan umum diarahkan kepada a) Menjamin ketersediaan sarana dan parasarana IB; b) Menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; c) Meningkatkan kemampuan SDM peternakan.

Strategi-3. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi.

Arah Kebijakan. Kebijakan umum diarahkan kepada Memfasilitasi sarana dan prasarana peternak baik hulu maupun hilir .

Strategi-4. Pemanfaatan peluang investasi untuk pengembangan komoditas unggulan peternakan, Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor, Memfasilitasi lembaga keuangan dengan peternak dalam usaha peningkatan usaha.

Arah Kebijakan. Kebijakan umum diarahkan kepada Memfasilitasi lembaga keuangan pemerintah dan swasta dengan kelompok-kelompok agribisnis peternakan.

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Utara yaitu terwujudnya swasembada pangan asal ternak yang

berkelanjutan dan berdayasaing menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera, maka telah ditetapkan 4 misi. Keempat misi tersebut adalah, 1) menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas yang berdaya saing, 2) memberdayakan sumberdaya manusia dan teknologi peternakan secara optimal, 3) menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat, 4) menciptakan lapangan pekerjaan di bidang agribisnis peternakan.

Misi-misi tersebut dijabarkan kepada 4 tujuan yaitu 1) terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor, 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan, 3) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak, 4) ketersediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Tujuan pertama memiliki sasaran berupa meningkatnya populasi ternak dan produksi serta daya saing dengan indikator berupa peningkatan produksi daging (4,08%/thn).

Tujuan ke-dua memiliki sasaran meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan, dengan indikator berupa peningkatan jumlah akseptor (8,10%/thn) dan kelahiran IB (8,32%/thn).

Tujuan ke-tiga memiliki sasaran meningkatnya Nilai Tukar Petani Peternak (NTP) dengan indikator peningkatan NTP sub-sektor peternakan sebesar 0,79%/thn.

Tujuan ke-empat dengan sasaran meningkatnya kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB. Namun demikian persentase kontribusi Sub-sektor peternakan terhadap PDRB diprediksikan akan menurun sebesar -2,31%/thn yang diakibatkan oleh meningkatnya kontribusi sub-sektor lain secara signifikan.

BAB V
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategi provinsi Sumatera Utara dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan provinsi Sumatera Utara.

Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk pencapaian tujuan visi misi SKPD sebagai bagian integral dari visi misi provinsi.

Tujuan utama yang harus dicapai adalah terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industry dan ekspor. Tujuan ini dicapai melalui program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah pencapaian produksi daging 141.687 ton (2014) meningkat menjadi 164.792 ton pada tahun 2018 (Lampiran 13).

Dasar perhitungan target produksi daging didasarkan kepada asumsi pencapaian asumsi asupan protein sebesar 55 gr/kap/hr dan 35% dipasok oleh protein hewani (Tabel 5.1). Sementara itu, sesuai dengan pola konsumsi masyarakat, maka porsi asupan protein terbesar dipasok oleh ikan, sedangkan daging memberikan kontribusi asupan protein 9,1%, telur 6,7%, dan susu 0,2%.

Tabel 5.1. Asupan protein anjuran

Asupan Total protein	55 gr/kap/hr = 20 kg/kap/th			
	Sumber Protein	Porsi	(Protein) gr/kap/hr	(Daging/Telur/Susu) kg/kap/hr
Hewani	35.0%	19.3	0.11	41.83
Ikan	18.9%	10.45	0.06	21.79
Daging	9.1%	5.02	0.03	10.18
Telur	6.7%	3.70	0.03	10.00
Susu	0.2%	0.13	0.002	0.60

Sumber data : WKNPG (2004); BPS Sumut (2011)

Menggunakan data asupan protein dan konsumsi daging di atas serta pola konsumsi masyarakat Sumut, maka dapat disusun target konsumsi berdasarkan komoditas seperti tertera pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Target konsumsi daging menurut komoditas

Jenis Ternak	2014	2015	2016	2017	2018
Sapi Potong	1.84	1.89	1.94	1.99	2.03
Kerbau	0.55	0.57	0.58	0.60	0.61
Kambing	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28
Domba	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15
Babi	2.87	2.95	3.03	3.10	3.17
ayam buras	1.08	1.11	1.14	1.17	1.20
ayam petelur	0.63	0.65	0.67	0.68	0.70
ayam pedaging	2.64	2.72	2.79	2.86	2.93
Itik	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20
Total Daging	10.17	10.46	10.73	11.00	11.26

Sejalan dengan jumlah konsumsi daging per kapita di atas, maka dapat dihitung target produksi total daging seperti terlihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Target konsumsi dan produksi daging dari 2013-2018.

DAGING	2014	2015	2016	2017	2018
Kg/kap/th	10.17	10.46	10.73	11.00	11.26
Produksi (ton)	141,687	147,463	153,240	159,016	164,792

Berdasarkan target produksi di atas, dapat dihitung target produksi daging menurut komoditas seperti tertera pada Tabel 5.4. Kontributor daging tertinggi secara berurutan adalah ternak babi, ayam pedaging, sapi potong, ayam buras, ayam petelur, kerbau, kambing, itik, domba, dan kuda. Hal ini mencerminkan derajat keunggulan komoditas peternakan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, program pengembangan peternakan perlu disesuaikan dengan hal tersebut.

Tabel 5.4. Target produksi daging (ton) menurut komoditas pada tahun 2013-2018.

Jenis Ternak	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Sapi Potong		25.661	26.708	27.755	28.801	29.847
Kerbau		7,669	7,981	8,294	8,607	8,919
Kambing		3,550	3,695	3,840	3,985	4,129
Domba		1,846	1,921	1,997	2,072	2,147
Babi		39,906	41,533	43,160	44,786	46,413
ayam buras		14,911	15,519	16,127	16,735	17,343
ayam petelur		8,805	9,164	9,523	9,882	10,241
ayam pedaging		36,782	38,281	39,781	41,280	42,780
Itik		2,556	2,660	2,765	2,869	2,973
Jumlah	135,911	141,687	147,463	153,240	159,016	164,792

Menggunakan data target produksi daging di atas, maka dapat dihitung target perkembangan populasi menurut komoditas seperti tertera pada Tabel 5.5.

Perkembangan populasi ternak sumber produksi daging dihitung berdasarkan parameter teknis meliputi estimasi berat karkas, persentasi jumlah pemotongan, kelahiran dan mortalitas. Berat karkas sapi potong diestimasi sejumlah 186 kg/ekor, kerbau: 193 kg/ekor, kambing dan domba : 13 kg/ekor, babi: 58 kg/ekor, ayam buras : 0,76 kg/ekor, ayam petelur : 0,99 kg/ekor, ayam pedaging 0,93 kg/ekor, dan itik : 0,84 kg/ekor. Tingkat pemotongan dari populasi total diestimasi pada ternak sapi potong sebesar 14,29%, ternak kerbau : 14,29%, ternak kambing dan domba : 30%, ternak babi : 80%, ayam buras 95%, ayam petelur 50%, ayam pedaging 80%, dan itik 80%.

Tabel 5.5. Target Perkembangan Populasi Ternak (ekor) 2013-2018

Jenis Ternak	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Sapi Potong	609,951	643.333	660.703	678.542	696.863	715.678
Kerbau	131,483	132.326	132.749	133.174	133.600	134.028
Sapi perah	1.057	1.272	1.395	1.530	1.678	1.841
Kambing	781,774	851.431	888.553	927.294	967.724	1.009.917
Domba	374,286	416.906	440.002	464.378	490.105	517.257
Babi	856,207	876.013	886.087	896.277	906.584	917.010

Ayam buras	12,073,428	12.870.953	13.289.259	13.721.160	14.167.098	14.627.529
Ayam petelur	12,055,592	12.596.802	12.876.451	13.162.308	13.454.511	13.753.201
Ayam pedaging	42,813,178	45.341.160	46.660.587	48.018.410	49.415.746	50.853.744
Itik	2,790,326	3.001.209	3.112.554	3.228.029	3.347.789	3.471.992

Sementara produksi telur diharapkan mencapai 139.363 ton pada 2014, dan meningkat menjadi 162.959 ton dalam tahun 2018. Produk susu juga diharapkan meningkat dari 835 ton pada tahun 2014 menjadi 1.131 dalam tahun 2018. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan dana sebesar Rp. 20 M pada tahun 2014, dan meningkat menjadi lebih kurang Rp. 35 M dalam tahun 2018.

Tujuan utama lainnya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan yang dicapai melalui program peningkatan pemanfaatan teknologi, khususnya pemanfaatan teknologi Inseminasi Buatan (IB). Indikator kinerja utama dari program ini adalah pencapaian jumlah akseptor IB dari 56.000 ekor (2014) menjadi 78.670 ekor pada tahun 2018. IKU lainnya adalah jumlah kelahiran IB yang mencapai 40.000 ekor (2014) dan meningkat menjadi 56.642 ekor pada tahun 2018. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan dana sebesar Rp. 5 M (2014) dan meningkat menjadi RP 8,745 M pada tahun 2018.

Tujuan berikutnya adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak yang dilakukan melalui program peningkatan kesejahteraan peternak dengan indicator nilai tukar peternak (NTP). Pada tahun 2014, NTP diharapkan mencapai 107,32 dan meningkat menjadi 109,88 pada tahun 2018.

Selanjutnya tersedianya kesempatan kerja dan berusaha merupakan tujuan utama lainnya yang dicapai melalui program pengembangan agribisnis, dengan indicator berupa kontribusi peternakan terhadap PDRB regional Sumatera Utara.. Pencapaian PDRB asal subsector peternakan pada tahun 2014 diharapkan mencapai 1,97% dari PDRB Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya walaupun secara absolute diharapkan PDRB asal peternakan meningkat, namun dengan peningkatan sub-sektor lainnya, maka diprediksikan kontribusi PSDR asal peternakan menurun

menjadi 1,79% pada tahun 2018. Untuk itu diperlukan dana sejumlah Rp. 5 M pada tahun 2014, dan meiningkat menjadi Rp. 8,745 M pada tahun 2018..

Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Oleh karena itu kegiatan juga merupakan penjabaran program dalam upaya mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang tercakup dalam program 1 (Program Peningkatan Kesejahteraan Petani) adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan SDM pelaku usaha peternakan.
- 2) Pembinaan kelompok dan kelembagaan peternak.
- 3) Fasilitasi kemitraan dan pemanfaatan modal usaha dan peternakan.

Kegiatan yang tercakup dalam program 2 (Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelamatan / Penjaringan ternak Betina Produktif.
- 2) Pengembangan Pembibitan ternak.
- 3) Pengembangan budidaya ternak.
- 4) Pengembangan pakan ternak.
- 5) Pemberantasan dan pengendalian Penyakit hewan.
- 6) Penyediaan pangan asal hewan yang ASUH.

Kegiatan yang tercakup dalam program 3 (Program peningkatan penerapan teknologi peternakan) adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi teknologi Inseminasi Buatan

Kegiatan yang tercakup dalam program 4 (Program pengembangan agribisnis) adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan integrasi ternak
- 2) Pengembangan kawasan peternakan
- 3) Pengembangan pengolahan dan peamasaran hasil peternakan

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pembiayaan

Indikator Kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai /mengukur kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) **kebijakan/program/ kegiatan** dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan indikator kinerja berupa NTP 109,88% pada tahun 2018, meningkat 0,79%/tahun.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk mencapai sasaran dengan indikator kinerja berupa pencapaian produksi daging 4,08 % per tahun (141.687 ton pada tahun 2014 menjadi 164.792 ton pada tahun 2018).

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan memiliki indikator kinerja berupa peningkatan jumlah akseptor IB sebesar 8,10 % per tahun (56.000 ekor pada tahun 2014 menjadi 78.670 ekor pada tahun 2018) dan peningkatan jumlah kelahiran hasil IB sebesar 8,32 % per tahun (40.000 ekor pada tahun 2014 menjadi 56.642 ekor pada tahun 2018).

Program pengembangan agribisnis memiliki indikator kinerja berupa kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB provinsi yakni 1,97 % pada tahun 2014 dan 1,79 % pada tahun 2018).

Pembiayaan. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan di atas berjumlah Rp. 41 milyar untuk tahun 2014 (Tabel 5.6.).

Tabel 5.6. Biaya yang Diperlukan (Rp M) Menurut Bidang

Bidang	2014	2015	2016	2017	2018
Sekretariat	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Budidaya	8.28	9.52	10.95	12.59	14.48
Sarana Prasarana	5.24	6.03	6.94	7.98	9.17
Keswan	3.74	4.30	4.94	5.68	6.54
Bina Usaha	5.43	6.25	7.18	8.26	9.50
Kesmavet	2.66	3.06	3.52	4.04	4.65
BIBD	9.65	11.10	12.76	14.68	16.88
Jumlah	41.00	46.25	52.29	59.23	67.22

Untuk mendukung implementasi program Bidang Teknis, maka diperlukan program kesekretariatan meliputi Pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan, serta peningkatan disiplin aparatur.

Kegiatan yang tercakup dalam Program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan layanan administrasi kantor
- 2) Penyediaan jasa pendukung layanan perkantoran

Kegiatan yang tercakup dalam Program peningkatan sarana dan sarana aparatur adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 2) Pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor

Kegiatan yang tercakup dalam Program peningkatan disiplin aparatur adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan perlengkapan pegawai
- 2) Perayaan hari-hari besar negara

Kegiatan yang tercakup dalam Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur adalah sebagai berikut :

-
- 1) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis pegawai
 - 2) Bimbingan keagamaan dan kesehatan

Kegiatan yang tercakup dalam Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan dinas;
- 2) Penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan indikator kinerja berupa NTP 109,88% pada tahun 2018, meningkat 0,79%/tahun.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk mencapai sasaran dengan indikator kinerja berupa pencapaian produksi daging 4,08 % per tahun (141.687 ton pada tahun 2014 menjadi 164.792 ton pada tahun 2018).

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan memiliki indikator kinerja berupa peningkatan jumlah akseptor IB sebesar 8,10 % per tahun (56.000 ekor pada tahun 2014 menjadi 78.670 ekor pada tahun 2018) dan peningkatan jumlah kelahiran hasil IB sebesar 8,32 % per tahun (40.000 ekor pada tahun 2014 menjadi 56.642 ekor pada tahun 2018).

Program pengembangan agribisnis memiliki indikator kinerja berupa kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB provinsi yakni 1,97 % pada tahun 2014 dan 1,79 % pada tahun 2018).

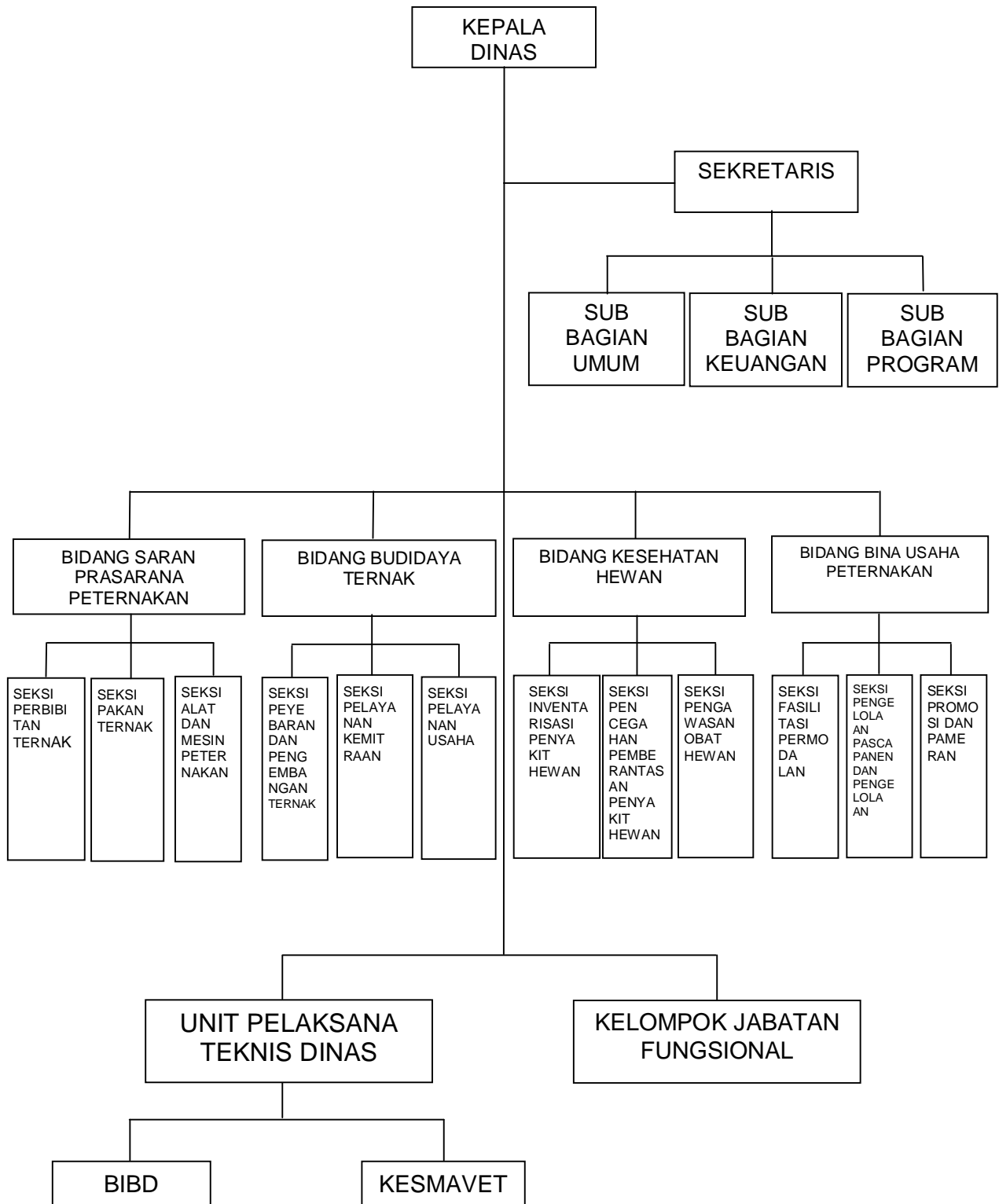
Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas dan indikator kinerja, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018. Sejalan dengan hal tersebut, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2013 -2018 ini merupakan panduan bagi pimpinan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang mengacu kepada dokumen Renstra di atas akan lebih mudah dilaksanakan karena Renstra tersebut sudah memiliki program dan kegiatan yang dapat diukur keberhasilannya melalui penilaian indikator kerjanya.

Namun demikian, implementasi Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masih

dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Menyadari bahwa pencapaian target sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tidak mudah, maka diharapkan implementasi rencana kerja tahunan dilakukan melalui 5 prinsip yaitu 1) Not business as usual; 2) Memiliki daya saing; 3) Efektif dan efisien; 4) Pelayanan publik yang prima; 5) Adanya partisipasi A_B_G_C yaitu Academic, Business, Government, Community.

**Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Sumatera Utara**



Lampiran 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Renstra SKPD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013*	2009	2010	2011	2012	2013*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)
1	Populasi																		
	- Sapi perah	-	9,69	-	2.499	2.701	2.904	3.107	3.330	2.409	2.569	894	1.057	1.075	0,96	0,95	0,31	0,34	0,32
	- Sapi potong	-	2,70	-	405.344	415.728	426.111	436.495	447.159	401.821	462.443	541.698	609.951	625.817	0,99	1,11	1,27	1,40	1,40
	- Kerbau	-	0,32	-	190.378	190.983	191.588	192.194	192.801	158.235	161.046	114.289	131.483	139.701	0,83	0,84	0,60	0,68	0,72
	- Kuda	-	0,49	-	3.588	3.605	3.623	3.640	3.658	2.817	3.098	3.132	3.069	3.138	0,79	0,86	0,86	0,84	0,86
	- Kambing	-	4,36	-	826.234	859.368	892.503	925.637	960.217	625.815	744.535	762.180	781.774	805.065	0,76	0,87	0,85	0,84	0,84
	- Domba	-	5,54	-	318.823	334.724	350.625	366.526	383.308	270.420	317.777	325.722	374.286	409.375	0,85	0,95	0,93	1,02	1,07
	- Babi	-	1,15	-	821.240	830.472	839.704	848.936	858.274	653.150	742.670	749.354	866.207	947.414	0,80	0,89	0,89	1,02	1,10
	- Ayam buras	-	3,25	-	17.404.976	17.936.113	18.467.251	18.998.389	19.546.788	11.554.037	11.671.883	11.963.681	12.073.428	12.447.014	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64
	- Ayam ras petelur	-	2,22	-	8.589.610	8.772.193	8.954.776	9.137.358	9.323.994	8.168.685	8.839.750	8.994.445	12.055.592	12.455.592	0,95	1,01	1,00	1,32	1,34
	- Ayam ras pedaging	-	2,91	-	45.369.765	46.617.412	47.865.059	49.112.707	50.396.660	43.878.127	39.376.258	40.167.721	42.813.178	44.790.497	0,97	0,84	0,84	0,87	0,89
	- Itik	-	3,71	-	3.799.922	3.931.162	4.062.401	4.193.640	4.329.748	1.953.647	2.569.664	2.626.968	2.790.326	2.848.329	0,51	0,65	0,65	0,67	0,66
	- Puyuh	-	-	-	-	-	-	-	-	163.448	178.834	183.251	264.918	271.700	-	-	-	-	-
	- Kelinci	-	-	-	-	-	-	-	-	35.759	20.626	21.063	20.577	21.091	-	-	-	-	-
	- Merpati	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11.385	11.698	18.307	18.765	-	-	-	-	-
	- Itik manila	-	-	-	-	-	-	-	-	0	54.086	54.951	317.589	325.529	-	-	-	-	-
2	Produksi																		
	- Daging	-	4,10	-	136.402,78	141.571,47	146.740,15	151.908,83	157.289,43	125.391,47	127.847,93	131.043,88	135.911,00	151.414,66	0,92	0,90	0,89	0,89	0,96
	- Telur	-	4,42	-	113.198,81	117.795,83	122.392,84	126.989,85	131.790,05	91.246,68	102.385,68	104.308,65	133.464,26	137.686,98	0,81	0,87	0,85	1,05	1,04
	- Susu	-	15,56	-	1.975,93	2.210,41	2.444,89	2.679,37	2.950,34	1.719,37	1.849,94	684,48	761,04	774,03	0,87	0,84	0,28	0,28	0,26
3	Konsumsi																		
	- Daging	-	4,13	-	10,63	11,04	11,44	11,85	12,27	9,47	9,85	9,99	10,28	11,42	0,89	0,89	0,87	0,87	0,93
	- Telur	-	4,02	-	8,75	9,08	9,40	9,73	10,07	6,89	7,88	7,96	0,06	0,06	0,79	0,87	0,85	1,04	1,03
	- Susu	-	4,07	-	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,05	0,06	0,06	1,00	1,04	0,36	0,42	0,39

Lampiran 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000	3.000.000.000	9.425.000.000	-	-	-	9.300.000.000	8.800.000.000	6.000.000.000	-	-	-	7,75	2,93	0,64	-	-	-	64,08	-26,17
Pendapatan Asli Daerah	1.200.000.000	3.000.000.000	9.425.000.000	-	-	-	9.300.000.000	8.800.000.000	6.000.000.000	-	-	-	7,75	2,93	0,64	-	-	-	64,08	-26,17
- Hasil retribusi daerah	1.200.000.000	3.000.000.000	9.425.000.000	-	-	-	9.300.000.000	8.800.000.000	6.000.000.000	-	-	-	7,75	2,93	0,64	-	-	-	64,08	-26,17
BELANJA DAERAH	23.364.959.550	26.729.333.170	30.755.716.607	32.095.241.571	36.486.789.074	31.925.167.137	20.497.103.954	22.291.787.924	30.118.124.914	31.647.645.444	35.920.763.257	13.100.138.634	0,88	0,83	0,98	0,99	1,00	1,27	-16,40	-14,78
Belanja tidak langsung	4.160.923.000	5.905.882.670	6.256.423.505	6.875.736.400	8.256.648.003	4.207.963.259	3.999.207.713	5.658.068.939	6.274.039.837	6.802.172.114	8.234.007.038	5.349.203.481	0,96	0,96	1,00	0,99	1,00	1,27	0,23	6,75
- Belanja pegawai	4.160.923.000	5.905.882.670	6.256.423.505	6.875.736.400	8.256.648.003	4.207.963.259	3.999.207.713	5.658.068.939	6.274.039.837	6.802.172.114	8.234.007.038	5.349.203.481	0,96	0,96	1,00	0,99	1,00	1,27	0,23	6,75
Belanja langsung	19.204.036.550	20.823.450.500	24.499.293.102	25.219.505.171	28.230.141.071	27.717.203.878	16.497.896.241	16.633.718.985	23.844.085.077	24.845.473.330	27.686.756.219	7.750.935.153	0,86	0,80	0,97	0,99	0,98	0,28	8,87	-10,60
- Belanja pegawai	2.306.347.500	1.426.980.000	1.286.901.500	1.329.955.000	1.720.590.000	1.687.859.500	2.183.858.125	1.226.820.000	1.256.541.500	1.329.780.000	1.698.637.500	5.310.010.753	0,95	0,86	0,98	1,00	0,99	3,15	-5,36	28,63
- Belanja barang dan jasa	13.557.744.050	14.627.620.500	19.693.442.902	17.364.450.171	23.909.551.071	24.271.844.378	11.206.448.616	13.628.879.035	19.221.758.577	17.055.243.760	23.444.520.619	2.000.304.400	0,83	0,93	0,98	0,98	0,98	0,08	15,81	-16,43
- Belanja modal	3.339.945.000	4.768.850.000	3.518.948.700	6.525.100.000	2.600.000.000	1.757.500.000	3.107.589.500	1.778.019.950	3.345.785.000	6.460.449.570	2.543.598.100	440.620.000	0,93	0,37	0,96	0,99	0,98	0,25	-9,48	-17,16

* s/d september 2013

Lampiran 4. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan sapi potong

No.	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Memiliki sapi potong yang adaptif	Pertumbuhan lambat	Pasar domestik cukup besar	Pemotongan sapi betina produktif masih tinggi
2	Produktivitas bagus pada kondisi pakan yang tidak optimum	Angka kematian tinggi	Lahan dan sumber pakan tersedia	Terjadinya ekspor bahan pakan
3	Bebas penyakit eksotik (PMK)	Sensitif terhadap Jembrana dan MCF	Dukungan kebijakan kredit mikro tersedia	Ketersediaan pakan berfluktuasi

Lampiran 5. Strategi, kebijakan operasional, dan kegiatan pengembangan sapi potong yang diperlukan

No	Strategi	Kebijakan Operasional	Kegiatan Pengembangan
1	Optimalkan kemampuan sapi potong yang adaptif untuk memenuhi pasar domestik yang cukup besar.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan VBC. • Pengembangan cluster peternakan. • Peningkatan efisiensi pasar hewan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunkan tingkat kematian anak dan induk. 2) Mengoptimalkan sistem integrasi tanaman-ternak. 3) Pembangunan dan pemberdayaan pasar hewan.
2	Tingkatkan kemampuan sapi potong yang adaptif untuk mengurangi pemotongan sapi betina produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan reproduksi sapi potong. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan VBC sapi potong di sentra produksi. 2) Memperpendek jarak beranak induk. 3) Meningkatkan pengendalian penyakit reproduksi. 4) Mengoptimalkan penggunaan pakan lokal. 5) Peningkatan pelaksanaan recording ternak.
3	Tingkatkan kemampuan tumbuh sapi untuk mengantisipasi pasar domestik	Peningkatan pertumbuhan sapi sesuai kebutuhan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan kualitas pakan. 2) Meningkatkan efisiensi usaha.
4	Tingkatkan pertumbuhan untuk mengurangi pemotongan sapi betina produktif	Peningkatan produktivitas sapi untuk mencukupi kebutuhan pasar tanpa pemotongan sapi betina produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas daging sapi potong. 2) Merumuskan opsi kebijakan untuk meminimalkan pemotongan ternak betina produktif. 3) Meningkatkan pertumbuhan sapi dara untuk mencapai bobot kawin lebih awal.

Lampiran 6. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan sapi perah

No	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Memiliki sapi perah yang adaptif	Penyakit reproduksi dan mastitis	Pasar domestik cukup besar	Sumber pakan yang terbatas
2	Manajemen budidaya sapi perah yang terintegrasi	Angka kematian yang tinggi	Kelembagaan pemasaran yang baik	Harga bahan baku produk impor yang lebih murah
3	Keturunan sapi FH dengan produksi tinggi	Sensitif terhadap agroekosistem	Dukungan kebijakan kredit mikro- UKM	Harga pakan berfluktuasi

Lampiran 7. Strategi, kebijakan operasional, dan kegiatan pengembangan sapi perah yang diperlukan

No	Strategi	Kebijakan Operasional	Kegiatan Pengembangan
1	Optimalkan sapi perah yang adaptif untuk memenuhi pasar domestik	Peningkatan kemampuan adaptabilitas sapi perah	1) Mengembangkan VBC sapi perah di sentra produksi. 2) Meningkatkan efektivitas pemeliharaan untuk hasilkan <i>replacement stock</i> yang berkualitas. 3) Peningkatan produktivitas dan kualitas susu. 4) Penyediaan teknologi pasca panen susu sapi di peternak rakyat. 5) Mendorong berkembangnya Industri Pengolahan Susu (IPS) di Sumut.
2	Optimalkan kemampuan sapi perah yang adaptif untuk mengatasi keterbatasan sumber pakan	Peningkatan sumber pakan untuk meningkatkan kemampuan sapi perah yang adaptif	1) Optimasi pemanfaatan bahan baku pakan lokal. 2) Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber serat, enersi, dan protein. 3) Optimasi skala usaha.
3	Tingkatkan kontrol terhadap penyakit reproduksi dan mastitis untuk antisipasi pasar domestik	Peningkatan kontrol penyakit mengurangi kejadian penyakit reproduksi dan mastitis untuk memenuhi pasar domestik	1) Penanggulangan penyakit reproduksi dan mastitis.
4	Tingkatkan kontrol terhadap penyakit reproduksi dan mastitis untuk atasi keterbatasan pakan	Peningkatan pemanfaatan sumber pakan alternatif dan kontrol terhadap penyakit reproduksi dan mastitis	1) Replikasi model sistem integrasi tanaman-ternak yang terkontrol dari penyakit reproduksi dan mastitis. 2) Peningkatan efisiensi usaha sapi perah.

Lampiran 8. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan unggas lokal

No	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Memiliki keragaman genetik tinggi	Angka kematian tinggi pada umur muda	Pangsa pasar domestik tinggi	Peka terhadap penyakit ND dan AI
2	Mampu mengatasi cekaman lingkungan	Pertumbuhan lambat	Mampu memanfaatkan limbah sebagai pakan	Daya beli masyarakat menurun
3	Diversifikasi produk dengan nilai tambah tinggi	Manajemen masih tradisional	Tersedia dukungan kebijakan kredit mikro-UKM	Kebijakan impor dan PPn (<i>chicken leg</i> , bahan pakan)

Lampiran 9. Strategi, kebijakan operasional, dan kegiatan pengembangan unggas lokal yang diperlukan

No	Strategi	Kebijakan Operasional	Kegiatan Pengembangan
1	Memanfaatkan keragaman genetik untuk memenuhi pasar domestik yang tinggi	Pemanfaatan keragaman genetik unggas lokal untuk memenuhi pasar	1) Peningkatan produktivitas unggas lokal melalui perbaikan budidaya. 2) Pengembangan VBC unggas lokal.
2	Meningkatkan keragaman genetik untuk mengantisipasi penyakit strategis	Pengurangan kejadian penyakit strategis melalui peningkatan keragaman genetik	1) Pencegahan penyakit strategis khususnya flu burung.
3	Menekan angka kematian tinggi pada umur muda untuk memenuhi pasar domestik	Peningkatan manajemen usaha berorientasi pasar	1) Perbaikan manajemen pemeliharaan untuk menekan angka kematian yang tinggi pada umur muda.
4	Menekan angka kematian tinggi dengan mengatasi kejadian penyakit strategis	Pengendalian penyakit strategis	1) Penerapan biosecurity unggas lokal.

Lampiran 10. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan kambing/domba

No	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai agroekosistem	Peka terhadap <i>ecto</i> dan <i>endo</i> parasit	Terdapat perkebunan dan hutan yang luas dan berpotensi sebagai sumber hijauan pakan ternak	Impor ternak dan produk ternak yang kurang terkontrol
2	Memiliki sistem reproduksi yang tidak dipengaruhi musim	Angka kematian tinggi pada pra-sapih	Kemampuan memanfaatkan sumber pakan <i>by products</i>	Kebijakan tata guna lahan dan ruang
3	Memiliki keragaman genetik yang tinggi	<i>Carrier</i> penyakit MCF	Pasar domestik dan ekspor yang besar	Fluktuasi harga pakan

Lampiran 11. Strategi, kebijakan operasional, dan kegiatan pengembangan kambing/domba yang diperlukan

No	Strategi	Kebijakan Operasional	Kegiatan Pengembangan
1	Optimasi daya adaptasi yang tinggi untuk memanfaatkan potensi perkebunan dan hutan	Memanfaatkan daya adaptasi yang tinggi melalui optimasi penggunaan potensi perkebunan dan hutan	1) Pengembangan VBC kambing domba unggul sentra produksi. 2) Peningkatan produktivitas melalui penerapan sapta usaha peternakan. 3) Optimasi pengembangan dan pemanfaatan hijauan pakan ternak unggul.
2	Optimasi daya adaptasi yang tinggi untuk mengantisipasi masuknya ternak dan produk impor ilegal	Memanfaatkan daya adaptasi yang tinggi untuk mengantisipasi masuknya ternak dan produk impor ilegal	1) Pengembangan kawasan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing.
3	Meminimalkan serangan ecto dan endo parasit di wilayah perkebunan dan hutan	Optimalkan pemanfaatan lahan perkebunan dan hutan untuk meminimalkan serangan ecto dan endo parasit	1) Pengembangan sistem integrasi domba/kambing di perkebunan dan hutan.
4	Menekan serangan ecto dan endo parasit untuk mencegah masuknya ternak dan produk impor ilegal	Antisipasi masuknya ternak dan produk impor ilegal untuk meminimalkan serangan ecto dan endo parasit	1) Pengendalian penyakit ecto dan endo parasit.

Lampiran 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2014		2015		2016		2017		2018					
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi kantor	Program pelayanan administrasi perkantoran	Proses administrasi	-	20%	1.500	20%	2.000	20%	2.500	20%	3.000	20%	3.500	100%	12.500		
			Penyediaan layanan administrasi kantor			1 paket	750	1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	1 paket	1.750	5 paket	1.750		
			Penyediaan jasa pendukung layanan perkantoran			1 paket	750	1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	1 paket	1.750	5 paket	1.750		
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan sarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan sarana aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	-	20%	2.000	20%	2.500	20%	3.000	20%	3.500	20%	4.000	100%	15.000		
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor			1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	1 paket	1.750	1 paket	2.000	5 paket	2.000		
			Pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor			1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	1 paket	1.750	1 paket	2.000	5 paket	2.000		
Meningkatnya disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan aparatur	-	20%	500	20%	1.000	20%	1.500	20%	2.000	20%	2.500	100%	7.500		
			Pengadaan perlengkapan pegawai			1 paket	250	1 paket	500	1 paket	750	1 paket	1.000	1 paket	1.250	5 paket	1.250		
			Perayaan hari-hari besar negara			1 paket	250	1 paket	500	1 paket	750	1 paket	1.000	1 paket	1.250	5 paket			
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Sumberdaya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kapasitas sumberdaya aparatur	-	20%	500	20%	1.000	20%	1.500	20%	2.000	20%	2.500	100%	7.500		
			Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis pegawai			1 paket	250	1 paket	500	1 paket	750	1 paket	1.000	1 paket	1.250	5 paket	1.250		
			Bimbingan keagamaan dan kesehatan			1 paket	250	1 paket	500	1 paket	750	1 paket	1.000	1 paket	1.250	5 paket	1.250		

						20%	1.000	20%	1.500	20%	2.000	20%	2.500	20%	3.000	100%	10.000		
	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket	500	1 paket	1.250	1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	5 paket	1.500		
			Penyusunan laporan dinas			1 paket	500	1 paket	1.250	1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	5 paket	1.500		
			Penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi kegiatan			1 paket	500	1 paket	1.250	1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	1.500	5 paket	1.500		
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak	Meningkatnya nilai tukar petani peternak	NTP sub sektor peternakan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani peternak (%)	105.14	107.32	5,000	107.51	5,750	108.30	6,613	109.09	7,604	109.88	8,745	109.88	8,745	Dinas Peternakan	
			Peningkatan SDM pelaku usaha peternakan			1 paket	2.000	1 paket	2.250	1 paket	2.613	1 paket	2.604	1 paket	3.745	5 paket	3.745		
			Pembinaan kelompok dan kelembagaan peternak			1 paket	2.000	1 paket	2.250	1 paket	2.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	5 paket	3.000		
			Fasilitasi kemitraan dan pemanfaatan modal usaha dan peternakan			1 paket	1.000	1 paket	1.250	1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	2.000	5 paket	2.000		
Terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor	Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)	Produksi ternak	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				20,000		23,000		26,450		30,418		34,980		34,980	Dinas Peternakan	
				- Daging (ton)	135,911.00	141,687.22	147,463.43	153,239.65	159,015.87	164,792.09	164,792.09								
				- Telur (ton)	133,464.26	139,363.38	145,262.50	151,161.63	157,060.75	162,959.87	162,959.87								
				- Susu (ton)	761.04	835.17	909.29	983.42	1,057.54	1,131.67	1,131.67								
			Penyelamatan / Penjaringan ternak Betina Produktif			1 paket	3.000	1 paket	4.000	1 paket	5.000	1 paket	5.418	1 paket	5.980	5 paket	5.980		
			Pengembangan Pembibitan ternak			1 paket	3.000	1 paket	4.000	1 paket	4.000	1 paket	5.000	1 paket	5.000	5 paket	5.000		
			Pengembangan budidaya ternak			1 paket	3.000	1 paket	4.000	1 paket	4.000	1 paket	5.000	1 paket	6.000	5 paket	6.000		
			Pengembangan pakan ternak			1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	4.000	1 paket	5.000	1 paket	6.000	5 paket	6.000		

			Pemberantasan dan pengendalian Penyakit hewan			1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	4.000	1 paket	5.000	1 paket	6.000	5 paket	6.000		
			Penyediaan pangan asal hewan yang ASUH			1 paket	5.000	1 paket	5.000	1 paket	5.450	1 paket	5.000	1 paket	6.000	5 paket	6.000		
Optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan	Meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan	Hasil pemfaatan teknologi IB	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	Pemanfaatan teknologi IB			5.000		5.750		6.613		7.604		8.745		8.745	Dinas Peternakan	
				- Jumlah akseptor IB (ekor)	56,758.00	56,000.00		61,830.00		67,441.00		73,054.00		78,670.00		78,670.00			
				- Jumlah kelahiran IB (ekor)	37,388.00	40,000.00		44,518.00		48,558.00		52,599.00		56,642.00		56,642.00			
			Optimalisasi teknologi inseminasi buatan			1 paket	5.000	1 paket	5.750	1 paket	6.613	1 paket	7.604	1 paket	8.745	5 paket	8.745		
Tersedianya kesempatan kerja dan berusaha	Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	PDRB sub sektor peternakan	Program Pengembangan Agribisnis	- Kontribusi sub sektor peternakan terhadap ADHB (%)	1.98	1.97	5.000	1.81	5.750	1.82	6.613	1.80	7.604	1.79	8.745	1.79	8.745	Dinas Peternakan	
			Pengembangan integrasi ternak			1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	3.000	1 paket	3.000	5 paket	3.000		
			Pengembangan kawasan peternakan			1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	2.000	1 paket	3.000	5 paket	3.000		
			Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan			1 paket	1.000	1 paket	1.750	1 paket	2.613	1 paket	2.604	1 paket	2.745	5 paket	2.745		